



LAPORAN KINERJA INTERIM TW I TA 2021



**BALAI BESAR POM
DI PALEMBANG**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR LAMPIRAN	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
KATA PENGANTAR	viii
RINGKASAN EKSEKUTIF	ix
HIGHLIGHT LAPKIN TRIWULAN I TAHUN 2021	xi
BAB I . PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Tugas dan Fungsi Balai Besar POM di Palembang	1
1.3 Struktur Organisasi Balai Besar POM di Palembang	4
1.4 Isu Strategis: Aspek Strategis Organisasi & Permasalahan Utama yang dihadapi Organisasi	5
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	13
2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis Tahun 2021-2024	13
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021	45
2.3 Perjanjian Kinerja Triwulan I Tahun 2021	46
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Triwulan I Tahun 2021	48
2.5 Metode Pengukuran	51
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	52
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	52
3.2 REALISASI ANGGARAN	96
BAB IV. PENUTUP	99

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 RENSTRA BBPOM DI PALEMBANG TRIWULAN I TAHUN 2021-2024**
- LAMPIRAN 2 RENCANA KINERJA TAHUN 2021**
- LAMPIRAN 3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**
- LAMPIRAN 4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**
- LAMPIRAN 5 CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 tw 1**
- LAMPIRAN 6 CAPAIAN TINGKAT EFISIENSI S.D TRIWULAN I TAHUN 2021**
- LAMPIRAN 7 REWARD/PUNISHMENT MONEV IKK TW I TAHUN 2021**

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Cathment Area Balai Besar POM di Palembang	2
Tabel 2	Indikator Kinerja Utama Balai Besar POM di Palembang Tahun 2021	14
Tabel 3	Perjanjian Kinerja BBPOM di Palembang 2021	46
Tabel 4	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2021	48
Tabel 5	Kriteria Penilaian Capaian Kinerja	51
Tabel 6	Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan TW 1 Tahun 2021	52
Tabel 7	Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama TW 1 2021	54
Tabel 8	Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Triwulan I Tahun 2021	58
Tabel 9	Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Triwulan I Tahun 2021	60
Tabel 10	Capaian kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan Triwulan I Tahun 2021	62
Tabel 11	Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan Triwulan I Tahun 2021	64
Tabel 12	Capaian Indikator Kinerja Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu Triwulan I Tahun 2021	66
Tabel 13	Capaian Indikator Kinerja Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan Triwulan I Tahun 2021	67
Tabel 14	Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan	68

	Makanan Triwulan I Tahun 2021	
Tabel 15	Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM Triwulan I Tahun 2021	68
Tabel 16	Capaian indikator Kinerja Persentase keputusan / rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Triwulan I Tahun 2021	69
Tabel 17	Capaian Indikator Kinerja Persentase keputusan / rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder Triwulan I Tahun 2021	71
Tabel 18	Capaian Indikator Kinerja Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Triwulan I Tahun 2021	73
Tabel 19	Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan I Tahun 2021	74
Tabel 20	Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan Triwulan I Tahun 2021	76
Tabel 21	Capaian indikator Indeks Pelayanan Publik TW1 Tahun 2021	78
Tabel 22	Capaian Indikator Kinerja Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan yang Efektif di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Triwulan I Tahun 2021	79
Tabel 23	Capaian indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman Triwulan I Tahun 2021	81
Tabel 24	Capaian indikator kinerja Jumlah desa pangan aman Triwulan I Tahun 2021	82
Tabel 25	Capaian Indikator Kinerja Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya Triwulan I Tahun 2021	83
Tabel 26	Capaian Indikator Kinerja Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Triwulan I Tahun 2021	85
Tabel 27	Capaian Indikator Kinerja Persentase Sampel Makanan	87

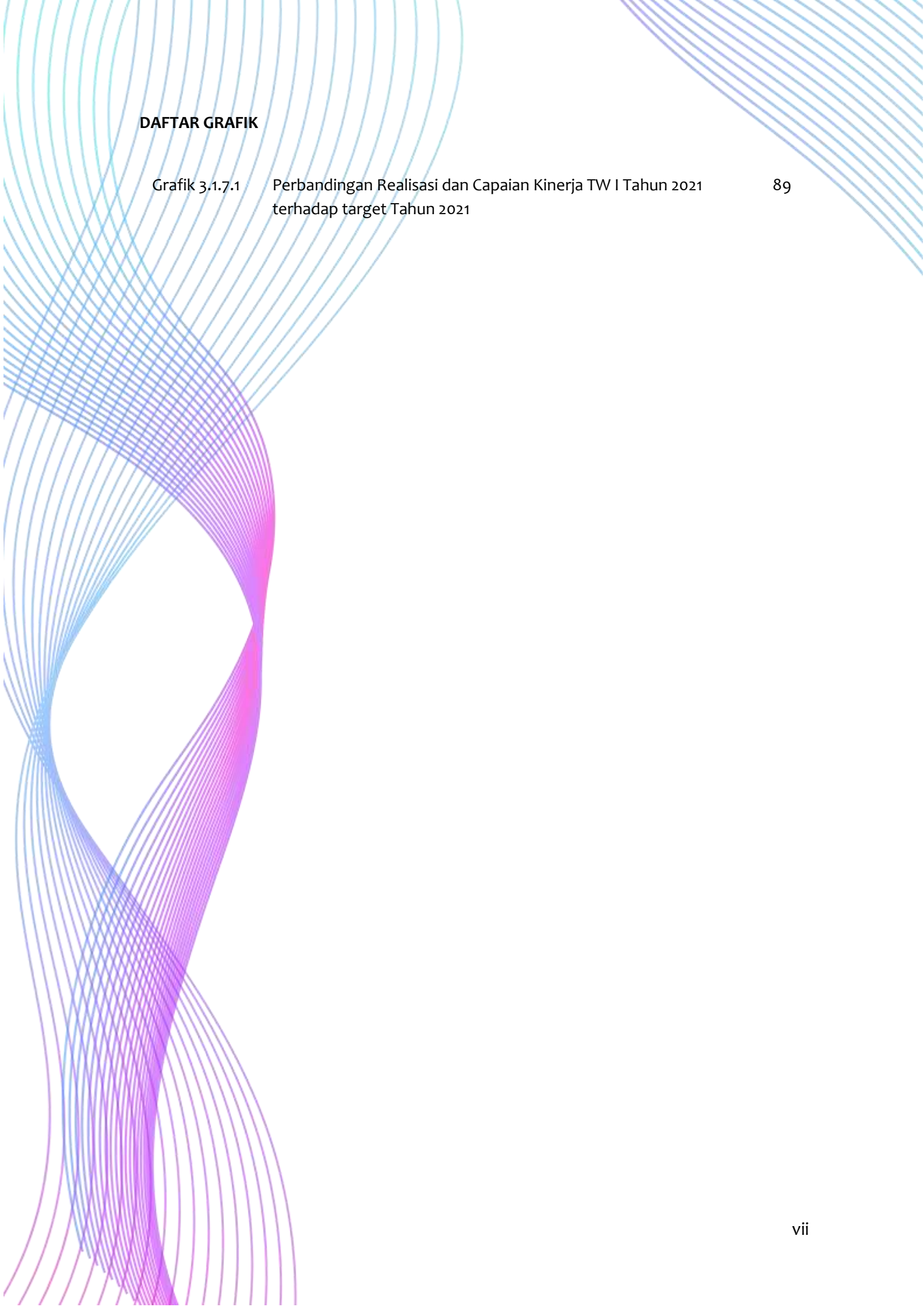
	yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Triwulan I Tahun 2021	
Tabel 28	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan VII Triwulan I Tahun 2021	88
Tabel 29	Capaian indikator Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang TW I Tahun 2021	91
Tabel 30	Capaian Indikator Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang TW I Tahun 2021	92
Tabel 31	Capaian indikator Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang TW I Tahun 2021	93
Tabel 32	Capaian Indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal TW I Tahun 2021	94
Tabel 33	Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Triwulan I Tahun 2021	94
Tabel 34	Capaian Indikator Kinerja Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Triwulan I Tahun 2021	94
Tabel 35	Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Triwulan I Tahun 2021	96
Tabel 36	Realisasi Anggaran Tiap Indikator Kegiatan Triwulan I Tahun 2021	96



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi BBPOM di Palembang

4



DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1.7.1	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW I Tahun 2021 terhadap target Tahun 2021	89
----------------	---	----

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang (BBPOM di Palembang) Interim Triwulan I tahun 2021 disusun dalam rangka menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dikenal dengan *Good governance* dan *Clean government*. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015.



Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Balai Besar POM di Palembang kepada masyarakat dan *stakeholders* dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis sebagai **Unit Pelaksana Teknis** BPOM. Laporan Kinerja Interim Triwulan I tahun 2021 merupakan laporan kinerja Balai Besar POM di Palembang dari Januari 2021 sampai dengan Maret 2021 sebagai salah satu UPT Badan POM sesuai Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Disamping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, pembuatan laporan ini juga sebagai upaya memperbaiki dokumen perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan pada triwulan selanjutnya, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan guna meningkatkan kinerja kedepannya.

Balai Besar POM di Palembang sudah berupaya kuat meningkatkan kinerja pengawasan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan. Upaya tersebut tercermin dari program dan kegiatan yang seluruhnya mendukung sasaran yang ditetapkan.

Kendala utama di Triwulan I Tahun 2021 ini adalah meningkatnya beban kerja serta bertambah luas dan kompleksnya permasalahan pengawasan Obat dan Makanan, sehingga perlu diimbangi dengan penguatan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional serta sarana dan prasarana yang memadai, khususnya penguatan laboratorium dan teknologi informasi.

Akhirnya diharapkan Laporan Kinerja yang telah tersusun ini dapat menjadi pertanggungjawaban bagi BBPOM di Palembang dan memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja organisasi dimasa mendatang.



Palembang, 12 April 2021
Kepala Balai Besar Pengawas Obat
Dan Makanan di Palembang

Yosef Dwi Irwan, S.Si., Apt
NIP. 19790505 200501 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Balai Besar POM di Palembang TW 1 Tahun 2021 merupakan informasi tentang Pengukuran Kinerja dan Pengukuran Efektifitas Kegiatan selama TW 1 tahun 2021. Pengukuran ini menyajikan capaian Perjanjian Kinerja tahun 2021 pada TW1 tahun 2021 yang telah dituangkan target pertriwulan dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang sesuai dengan Rencana Strategis Balai Besar POM di Palembang Tahun 2020-2024.

Selama 3(tiga) bulan kegiatan pada TW1 tahun 2021, Balai Besar POM di Palembang harus mencapai 11 sasaran kegiatan yang telah ditetapkan. Pencapaian sasaran tersebut diwujudkan melalui program pengawasan obat dan makanan di Balai Besar POM di Palembang. Berdasarkan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja yang telah dilakukan secara mandiri dan hasil penilaian pusat, diperoleh gambaran sebagai berikut:

- 1) Pada TW 1 Tahun 2021 dari 11 Sasaran Kegiatan hanya 5(lima) sasaran kegiatan yang dapat dihitung dengan 1(satu) sasaran kegiatan dengan kriteria capaian sangat baik, 2(dua) sasaran kegiatan kriteria capaiannya Baik, 1(satu) Sasaran Kegiatan dengan kriteria Capaian CUKUP dan 1(satu) Sasaran Kegiatan dengan Capaian Tidak Dapat disimpulkan.
- 2) Dari 5 (lima) Sasaran Kegiatan yang dicapai tersebut dari beberapa indikator sebagai berikut :
 - a. Sasaran Kegiatan target pertama mencapai kriteria **“BAIK” (104,67%)**. Hasil tersebut didapat dari capaian 4 (Empat) indikator dengan 2(dua) indikator kriteria **“ SANGAT BAIK”**, 1(dua) indikator dengan kriteria **“BAIK”** dan 1(satu) indikator dengan kriteria **“CUKUP”**.
 - b. Sasaran Kegiatan keempat dengan kriteria **“BAIK” (92,97%)** dengan 2 indikator dengan kriteria **“SANGAT BAIK”**, 2 indikator dengan kriteria **“BAIK”** dan 1 indikator dengan kriteria **“SANGAT KURANG”**.

- c. Sasaran Kegiatan keenam dengan kriteria **“SANGAT BAIK”**(119,18%) yang terdiri dari 1 Indikator dengan Kriteria **“SANGAT BAIK”** dan 1 indikator dengan kriteria **“TIDAK DAPAT DISIMPULKAN”**.
 - d. Sasaran Kegiatan ketujuh dengan kriteria **“TIDAK DAPAT DISIMPULKAN”**(157,32%) yang terdiri dari 1 Indikator kriteria **“TIDAK DAPAT DISIMPULKAN”**.
 - e. Sasaran Kegiatan kesebelas dengan kriteria **“CUKUP”**(81,52%) yang terdiri dari 1 Indikator dengan Kriteria cukup.
- 3) Pencapaian realisasi anggaran kegiatan sebesar Pencapaian realisasi anggaran kegiatan di TW1 sebesar 5,14% (Rp. **1.816.732.704**) dari Rp. **35.333.061.000** Anggaran Tahun 2021 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang diwujudkan melalui 11 kegiatan dengan realisasi anggaran per kegiatan berkisar antara 5,83% sampai dengan 55,97%.

Langkah-langkah antisipatif agar memenuhi target di Triwulan berikutnya, adalah sebagai berikut:

- a. Menambah sarana dan prasarana yang mendukung pengawasan obat dan makanan, seperti pengadaan alat-alat laboratorium, suku cadang, glassware, furniture pemenuhan infrastruktur, alat komunikasi, computer, peralatan khusus intelijen dan lain sebagainya.
- b. Meningkatkan kompetensi SDM dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan, layanan publik dan penindakan kejahatan obat dan makanan.
- c. Meningkatkan koordinasi dan advokasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder dalam rangka pengawasan pre dan post market termasuk tindak lanjut hasil pengawasan Balai Besar POM di Palembang serta penindakan terhadap kejahatan obat dan makanan.
- d. Melakukan review target berdasarkan capaian kinerja pada TW 1 tahun 2021.
- e. Melakukan update data sarana produksi dan distribusi sebagai data dukung pengawasan sarana berbasis risiko untuk memperluas cakupan pengawasan serta potensi kejahatan obat dan makanan.
- f. Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta rencana tindak lanjut terhadap capaian indikator kinerja BBPOM di Palembang dalam bentuk Laporan Kinerja Triwulan.
- g. Optimalisasi penggunaan aplikasi Monev Online yang ada untuk menunjang pencapaian Kinerja Balai Besar POM di Palembang.

- h. Berkomitmen mempertahankan penerapan akreditasi ISO/IEC 17025:2017 dan ISO 9001:2015;
- i. Mendorong kepatuhan pelaku usaha dengan memberikan bimbingan teknis dan pendampingan agar tetap berkomitmen dalam upaya memberikan jaminan keamanan dan mutu Obat dan Makanan.
- j. Meningkatkan inovasi layanan publik dalam rangka percepatan perizinan Obat dan Makanan.
- k. Meningkatkan internalisasi dan komitmen seluruh pegawai dalam penerapan Zona Integritas Menuju WBK WBBM di lingkungan BBPOM di Palembang.
- l. Meningkatkan sosialisasi website BPOM, HALO BPOM dan media sosial lainnya (IG, Twitter, Facebook);
- m. Melakukan pengujian terhadap parameter uji yg belum pernah dilakukan sebelumnya untuk meningkatkan Standar Ruang Lingkup Balai

HIGHLIGHT TW I TAHUN 2021 JANUARI sd MARET 2021

1. Operasi Penindakan Tahu mengandung Formalin

Senin dini hari 8 Maret 2021, tim PPNS Balai Besar POM di Palembang yang dipimpin langsung oleh Kepala Balai melakukan operasi penindakan tahu mengandung bahan berbahaya formalin di Pasar 7 Ulu dan Pabrik tahu di wilayah Padang Selasa Palembang. Operasi ini didampingi personil dari Ditreskrimsus dan Ditresnarkoba Polda Sumsel serta Sat.Pol PP Prov. Sumsel. Dari Operasi ini berhasil disita 20.000 butir tahu mengandung formalin, mesing giling kedelai, troli besi dan mobil truk yang dipakai mengangkut tahu ke pasar. Diamankan pula Pemilik pabrik tahu dan 3 orang karyawannya. Pada hari yang sama sekitar pukul 10.00 wib dilakukan konferensi pers hasil penindakan ini yang dihadiri juga oleh Ibu Fitrianti Agustinda, Wakil Walikota Palembang serta dari lintas sektor terkait antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan dan PD Pasar Palembang.



2. Pelayanan Prima Registrasi Pangan Olahan

Pada tanggal 15 Maret 2021 telah dilaksanakan kegiatan Desk Registrasi Pangan Olahan secara daring. Kegiatan ini seiring dengan program GERBANG SAMAWA (Gerakan Bersama Kembangkan Masyarakat Mandiri Wirausaha) yang bekerjasama dengan Direktorat Registrasi Pangan Olahan melakukan pendampingan pengurusan izin edar BPOM serta dalam upaya meningkatkan daya saing UMKM utamanya terkait jaminan mutu dan keamanan dan juga sebagai komitmen dalam melakukan jemput bola registrasi pangan olahan. Pelaku usaha dapat berkonsultasi langsung kepada petugas evaluator terkait kendala, tambahan data, dan segala hal seputar registrasi pangan. Dari 18 peserta yang ikut, diperoleh 15 NIE yang terbit dari 4 sarana dan 3 akun perusahaan yang telah diterima.



3. Pembinaan dan Monitoring Kinerja Kabupaten Kota Sesuai Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan Wilayah Sumatera

Dana alokasi khusus diberikan sejak Tahun 2020 untuk menjamin pengawasan obat dan makanan berjalan sesuai dengan NSPK di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya pada Tahun 2021, Badan POM telah memberikan DAK Non Fisik Subbidang Pengawasan Obat dan Makanan kepada 419 Kabupaten/ Kota dan merupakan tahun pertama untuk beberapa Kabupaten/ Kota yang diberikan kepada Pemda terkait pengawasan obat dan makanan. Masih belum maksimalnya pelaksanaan dan serapan anggaran pada Tahun 2020, maka perlu dilaksanakan pembinaan dan monitoring kinerja sehingga pelaksanaan Tahun 2021 lebih maksimal. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada tanggal 22-23 Maret 2021 bertempat di Wyndham OPI Hotel Palembang.



4. Pengawasan Keamanan Pangan di Pasar Tradisional dan Retail Modern

Pemerintah Kota Palembang yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Fitri Agustinda, selaku Wakil Walikota Palembang kembali mengajak tim BBPOM di Palembang untuk melakukan Intensifikasi Pengawasan Pangan di sarana distribusi pangan/ retail modern yang ada di Kota Palembang. Kegiatan ini untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat serta mengawal mutu keamanan pangan yang diproduksi atau beredar di Kota Palembang khususnya di retail modern pangan.

Pengawasan kali ini dilakukan pada 1 (satu) retail pangan modern yang cukup terkenal di Kota Palembang, yaitu : Hypermart PSX pada tanggal 18 Maret 2021. Petugas secara teliti memeriksa pangan yang dijual guna memastikan pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. Dari hasil pemeriksaan petugas terdapat temuan 9 (sembilan) item barang rusak, 1 (satu) item sampel TMK Label dan 1 (satu) item sampel mendekati ED. Terhadap temuan produk pangan TMK tersebut dilakukan pemusnahan oleh pemilik dan pelaku usaha membuat surat pernyataan untuk tidak lagi menjual produk yang TMK. Dari 9 (sembilan) sampel yang diuji terdapat 1 (satu) sampel kurma yang positif mengandung Formalin, sampel ini kemudian dirujuk ke laboratorium BBPOM di Palembang. Dari hasil uji rujuk diketahui sampel kurma tersebut negatif mengandung Formalin.

Petugas BBPOM di Palembang juga mengedukasi tentang pentingnya CEK KLIK sebelum membeli produk dan mensosialisasikan tentang CEK BPOM dan BPOM Mobile guna skrining awal legalitas produk Obat dan Makanan. Ayo Bersama Jaga dan Wujudkan Keamanan Pangan Untuk SDM Unggul - Indonesia Maju



5. Predikat Kinerja Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Terbaik

Balai Besar POM di Palembang mendapatkan apresiasi terkait Kinerja Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Terbaik dengan diberi kesempatan memaparkan Success Story Pengadaan Barang dan Jasa Balai Besar POM di Palembang pada tanggal 31 Maret 2021 saat Acara Rapat Kerja Nasional Badan POM di Bali.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Presiden RI nomor 80 tahun 2017 Badan Pengawas Obat dan Makanan ditetapkan sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Balai Besar POM di Palembang berdasarkan Lampiran Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan masuk dalam Klasifikasi UPT Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai Besar POM dengan wilayah kerja; Kota Palembang, Kabupaten Banyu Asin, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kota Prabumulih, Kota Pagar Alam.

1.2. Tugas dan Fungsi Balai Besar POM di Palembang

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar POM di Palembang disusun berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan

Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Balai Besar POM terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Menurut Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam melaksanakan tugas Balai Besar POM di Palembang sebagai salah satu UPT BPOM menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu. Bagian Tata Usaha terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional

Dalam melaksanakan tugas Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
- c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu;
- e. pelaksanaan urusan pengelolaan kepegawaian;
- f. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- g. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Pengelompokan uraian fungsi Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subkelompok substansi program dan evaluasi; dan
- b. Subkelompok substansi umum.

Kelompok Jabatan Fungsional

Dilingkungan UPT BPOM dapat ditetapkan Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas masing-masing. Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

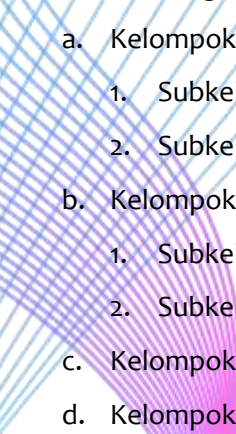
perundang-undangan
kebutuhan yang dida

Berdasarkan
Indonesia Nomor HK
Teknis di Lingkar
Balai Besar Pengawas

- a. Kelompok Su
- 1. Subkelom
- 2. Subkelom
- b. Kelompok Su
- 1. Subkelom
- 2. Subkelom
- c. Kelompok su
- d. Kelompok su

1.3. Struktur O

BBPOM di Palemban
22 Tahun 2020 denga



- a. Kelompok Substansi Pengujian, terdiri atas:
 - 1. Subkelompok substansi pengujian kimia; dan
 - 2. Subkelompok substansi pengujian mikrobiologi
- b. Kelompok Substansi Pemeriksaan, terdiri atas:
 - 1. Subkelompok substansi inspeksi; dan
 - 2. Subkelompok substansi sertifikasi
- c. Kelompok substansi penindakan; dan
- d. Kelompok substansi informasi dan komunikasi.

1.3. Struktur Organisasi Balai Besar POM di Palembang



Gambar 1. Struktur Organisasi BBPOM di Palembang

BBPOM di Palembang merupakan Unit Pelaksana Teknis BPOM sesuai Peraturan BPOM No. 22 Tahun 2020 dengan wilayah kerja adalah sebanyak 12 Kabupaten/ Kota terdiri dari 3 (tiga)

kota dan 9 (sembilan) kabupaten yang meliputi 168 kecamatan dengan penyebaran sebagai berikut:

I. KOTA		Ibukota	Jumlah Kecamatan
1.	Palembang	Palembang	16
2.	Prabumulih	Prabumulih	6
3.	Pagaralam	Pagaralam	5
II. KABUPATEN		Ibukota	Jumlah Kecamatan
1.	Ogan Ilir	Indralaya	16
2.	Ogan Komering Ilir	Kayu Agung	18
3.	Ogan Komering Ulu	Baturaja	12
4.	OKU Selatan	Muara Dua	19
5.	OKU Timur	Martapura	20
6.	Muara Enim	Muara Enim	20
7.	Musi Banyu Asin	Sekayu	14
8.	Banyuasin	Pangkalan Balai	17
9.	Penukal Abab Pematang Ilir	Talang Ubi	5

Tabel 1. Catchment Area BBPOM di Palembang

Dalam mendukung tugas-tugas Balai Besar POM di Palembang sesuai peran dan fungsinya, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian dan potensi yang sesuai. Berdasarkan perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK) tahun 2021, jumlah SDM yang dibutuhkan sebanyak 181 orang. Saat ini, SDM yang dimiliki Balai Besar POM di Palembang adalah 80 orang sehingga masih kekurangan 101 orang.

1.4 Isu Strategis : Aspek Strategis Organisasi & Permasalahan Utama yang dihadapi Organisasi

BBPOM di Palembang mempunyai posisi yang strategis berkaitan dengan tugas utama pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat di bidang obat dan makanan. Produk-produk ini merupakan kebutuhan dasar manusia tetapi sekaligus juga

beresiko memberi dampak buruk bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat apabila tidak dikelola dengan benar, dipergunakan secara tidak tepat atau disalahgunakan. Karena itu perlu dilakukan pengaturan dan pengawasan yang baik (*Good regulatory practice*) agar keamanan, manfaat dan mutu produk-produk tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penyelenggaraan pengawasan tersebut BBPOM di Palembang sebagai UPT BPOM perlu menjaga keseimbangan kepentingan antara perlindungan masyarakat /konsumen, perluasan akses produk bagi masyarakat luas dengan kepentingan strategis lainnya yang berkaitan dengan perekonomian nasional dan pendayagunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Identifikasi potensi dan permasalahan Balai Besar POM di Palembang dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi BPOM dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2020-2024. Identifikasi permasalahan tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai bahan rumusan dalam perencanaan tahun 2020-2024.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Balai Besar POM di Palembang perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja.

Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Globalisasi yang membawa keleluasaan informasi, peningkatan arus distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu berdimensi lintas bidang.

Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim, kerawanan lintas-batas antar provinsi, serta percepatan penyebaran wabah penyakit, perubahan tren penyakit yang mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi Balai Besar POM di Palembang. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas instansi Balai Besar POM di Palembang dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.

2. Pandemic COVID-19

Pada 11 Maret 2020, WHO (World Health Organization) telah menetapkan corona virus disease 2019 (Covid-19) sebagai pandemi. Virus dengan nama resmi SARS-CoV-2 ini pertama kali diidentifikasi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada Desember 2019, dan sudah menjalar ke 213 negara dan wilayah lain di seluruh dunia. Data tanggal 18 April 2020, kasus pasien positif virus corona (Covid-19) di dunia mencapai

2.324.731 kasus, dengan 160.434 kasus kematian, dan 595.467 kasus berhasil sembuh. Indonesia telah menyatakan Covid-19 sebagai bencana non alam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan. Di Indonesia, hingga tanggal 18 April 2020, jumlah pasien yang positif terinfeksi virus corona (Covid-19) sebanyak 6.248 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 535 meninggal dunia dan 631 orang dinyatakan telah sembuh dari Covid-19. Jumlah kasus virus corona di Indonesia masih terus meningkat. Demi menekan laju penyebaran, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah diantaranya physical/social distancing, melakukan tes massal atau rapid test untuk mencegah penyebaran virus covid-19, pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di sejumlah daerah, refocussing kegiatan dan realokasi anggaran Kementerian/Lembaga dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (Covid-19), K/L agar mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatankegiatan yang bersifat mendukung percepatan penanganan Covid-19. Masyarakat diharuskan ikut berpartisipasi untuk memerangi pandemi virus covid-19, yaitu dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, senantiasa menggunakan masker, membiasakan cuci tangan menggunakan sabun, membersihkan lingkungan terdekat menggunakan desinfektan, tidak melakukan perjalanan keluar daerah, dan senantiasa menjaga stamina tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan suplemen kesehatan serta berolahraga secara rutin.

Balai Besar POM di Palembang melaksanakan kinerja dan pelayanan publik dengan metode work from home (WFH). Pelaksanaan pelayanan publik dilakukan melalui online dan layanan sampel pihak ketiga dilakukan menggunakan sistem piket. Selain itu Balai POM di Palembang mendukung pencegahan penyebaran Covid-19 dengan cara senantiasa melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat baik secara langsung dengan menggunakan Mobil Laboratorium Keliling maupun secara online; melakukan pembuatan hand sanitizer dan desinfektan untuk digunakan oleh pegawai, tenaga kesehatan, instansi yang membutuhkan dan masyarakat secara umum; melakukan pemantauan kesehatan pegawai secara rutin (setiap hari); dan berkoordinasi dengan Pemda (Gubernur, Dinas Kesehatan dan Labkesda Provinsi Sumatera Selatan) dalam pengembangan laboratorium pengujian Covid-19 ataupun sebagai Anggota Satuan Tugas Pokja Komunikasi, Edukasi dan Informasi.

3. Adanya perjanjian-perjanjian internasional

Khususnya di bidang ekonomi yang menghendaki adanya area perdagangan bebas/*Free Trade Area* (FTA) diantaranya perjanjian ASEAN-6 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand) FTA, ASEAN-China FTA, ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP), ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA), ASEAN-India Free Trade Agreement (AIFTA) dan ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA). Perdagangan bebas ini membuka peluang perdagangan Obat dan Makanan yang tinggi dengan memanfaatkan kebutuhan konsumen terhadap produk dengan harga terjangkau. Hal ini merupakan salah satu penyebab beredarnya produk ilegal (tanpa izin edar, palsu, dan substandar) serta makanan yang mengandung bahan berbahaya.

4. Adanya jejaring kerja yang dimiliki Balai Besar POM di Palembang

Diantaranya Jejaring Keamanan Pangan Daerah dan Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal Daerah. Selain itu, BPOM juga berperan aktif dalam dalam jejaring kerja di daerah Sumatera Selatan guna mengawal pengawasan di bidang Obat dan Makanan serta peningkatan daya saing produk. Tantangan yang dihadapi BPOM terkait jejaring kerjasama ini diantaranya (i) *Kerjasama yang terjalin dengan stakeholder dan pemangku kepentingan* masih belum optimal, (ii) Koordinasi terkait pengawasan keamanan obat dan makanan masih belum optimal, (iii) Tindak lanjut dan Rekomendasi Tindak lanjut pemeriksaan di *Competent Contact Point* (CCP) belum cepat dan belum optimal, dan (iv) Sistem *traceability* di rantai suplai pangan masih lemah.

Pada tahun 2019 Balai Besar POM di Palembang telah melakukan rapat Koordinasi Rencana Pembentukan Satuan Karya Badan POM dengan Kwarcab Pramuka se-Sumatera Selatan. Kegiatan ini diharapkan mampu membuka jalan untuk pembentukan SAKA BPOM sehingga bisa memberdayakan potensi gerakan pramuka dalam melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan.

Selain itu telah dilaksanakan Kegiatan Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui KIE Obat dan Makanan Bersama Tokoh Masyarakat, Kunjungan Spesifik Anggota DPR

RI Komisi IX di BBPOM Palembang, kegiatan advokasi ke Kabupaten Kota di wilayah kerja BBPOM di Palembang..

5. Berlakunya program Sustainable Development Goals (SDGs)

Yang meliputi 17 goals bidang pengawasan Obat dan Makanan, terdapat beberapa agenda terkait dengan :

- a. *Goal 2. End hunger, achieve food security and improved nutrition, and promote sustainable agriculture.* Tantangan bagi BPOM ke depan adalah penyusunan kebijakan teknis terkini tentang standar gizi pangan olahan, pengawalan mutu, manfaat, dan keamanan pangan olahan, serta KIE kepada masyarakat.
- b. *Goal 3 Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages,* salah satu kondisi yang harus tercipta adalah pencapaian JKN, termasuk di dalamnya akses masyarakat terhadap obat dan vaksin yang aman, efektif, dan bermutu.

Tantangan bagi Balai Besar POM di Palembang ke depan adalah intensifikasi pengawasan *pre-market* dan *post-market*, serta pembinaan pelaku usaha agar secara mandiri menjamin mutu produknya.

6. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Merupakan tantangan bagi Balai Besar POM di Palembang untuk bersinergi dengan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan terkait Obat dan Makanan.

7. Adanya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional

Balai Besar POM di Palembang sebagai unit pelaksana teknis BPOM merupakan salah satu penyelenggara subsistem sediaan farmasi dan makanan yaitu menjamin aspek keamanan, khasiat/kemanfaat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar serta upaya kemandirian di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

8. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan untuk mewujudkan kemandirian dan peningkatan daya saing industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri melalui percepatan pengembangan industri farmasi dan alkes.

9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan,

Dimana substansi dari Inpres adalah penegasan terhadap tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga/Daerah dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.

10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* RB 2010-2025.

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam melakukan Reformasi Birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

11. Arahan Presiden Joko Widodo untuk dilakukan penguatan pengawasan Obat dan Makanan melalui penguatan kelembagaan BPOM.

Penguatan terhadap kelembagaan BPOM telah mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan di antaranya BPK RI dan Komisi IX DPR RI yang menyatakan bahwa diperlukan penguatan kelembagaan BPOM sesuai dengan kebutuhan organisasi BPOM yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Dengan adanya penguatan kelembagaan BPOM ini Balai Besar POM di Palembang sebagai UPT BPOM akan merasakan dampak terutama dalam hal menjalin kerjasama yang bersinergi dengan pemangku kepentingan serta dalam hal kewibawaan di lingkungan pemerintah daerah.

12. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Pertanahan, Bidang Pemerintahan, Bidang Kepegawaian, Bidang Kesehatan, Bidang Penanggulangan Bencana, Bidang Perpajakan, Bidang Komunikasi Dan Telekomunikasi, Bidang Pelatihan Dan Pendidikan, Bidang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Bidang Wawasan Kebangsaan, Bidang Kepamongprajaan, Bidang Perencanaan, Pembangunan Dan Tata Ruang Serta Bidang Perekonomian Tahap I.

Dengan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintah yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah. Hal ini berdampak pada pengawasan obat dan makanan yang tetap bersifat sentralistik dan tidak mengenal batas wilayah (*borderless*), dengan *one line*

command (satu komando), sehingga apabila terdapat suatu produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat maka dapat segera ditindaklanjuti.

13. **Masih banyaknya penduduk yang mengkonsumsi obat modern dibandingkan dengan obat tradisional**, sehingga menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Palembang untuk melakukan pengawasan *post-market* termasuk farmakovigilans

14. **Tingginya pertumbuhan sektor industri obat dan makanan, termasuk UMKM**

Khusus untuk BBPOM di Palembang untuk industri makanan merupakan industri yang cukup berkembang dengan pesat, dimana dahulunya sarana produksi MD masih dibawah 50 sarana saat ini sudah mencapai lebih dari 50 sarana yaitu sebanyak 59 sarana. Untuk sarana PIRT berjumlah sekitar 2.807 sarana.

15. **Pertumbuhan penduduk dan perubahan komposisi penduduk**

Laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2010-2015 sebesar 1,48, tahun 2010-2016 sebesar 1,46, tahun 2010 -2017 adalah 1,44 persen, tahun 2010-2018 adalah 3,15% dan tahun 2010-2019 adalah 1,39%.

16. **Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam produksi dibidang obat dan makanan serta meningkatnya tren transaksi online**, menyebabkan perlunya intensifikasi pengawasan Obat dan Makanan tidak secara *bussiness as usual* namun perlunya pengawasan semesta meliputi seluruh komponen pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

17. **Adanya perkembangan teknologi informasi**, dapat menjadi potensi bagi Balai Besar POM di Palembang untuk dapat melakukan pelayanan secara *online*, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat.

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi Balai Besar POM di Palembang digunakan analisa SWOT dengan melakukan indentifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Palembang periode 2020-2024. Dalam melakukan analisa SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman. Analisa SWOT ini

dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu.

Analisa faktor lingkungan internal adalah suatu keadaan yang berasal dari dalam komunitas/organisasi yang dapat mempengaruhi dan membentuk kondisi/situasi tertentu pada komunitas/organisasi tersebut. Hasil pengolahan data SWOT dapat ditentukan beberapa faktor yang dianggap kekuatan (*strength*) pada Balai Besar POM di Palembang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024

Penyusunan Renstra Balai Besar POM di Palembang telah mengacu pada Renstra BPOM tahun 2020 – 2024 yaitu terkait dengan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai/Balai Besar POM. Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BBPOM di Palembang, sebagai berikut :

”Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

”Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek:

Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.

Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.

Berdaya saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa;
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI BESAR POM DI PALEMBANG:

Indikator Kinerja Utama Balai Besar POM di Palembang berdasarkan Renstra BPOM tahun 2020-2024, terdiri dari 28 indikator, seperti yang tercantum pada tabel di bawah ini :

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Persentase obat yang memenuhi syarat
		Persentase makanan yang memenuhi syarat
		Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan

		Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Palembang
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Palembang
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Jumlah desa pangan aman Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya
6	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
7	Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan
8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di lingkup BBPOM di Palembang yang optimal	Indeks RB BBPOM di Palembang Nilai AKIP BBPOM di Palembang
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Palembang yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN BBPOM di Palembang
10	Menguatnya Laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Palembang yang optimal.
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Palembang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Palembang Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Palembang

Tabel 2.Indikator Kinerja Utama Balai Besar POM di Palembang Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis 1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang

Komoditas/produk yang diawasi BBPOM di Palembang tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BBPOM di Palembang merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari: **Pertama**, penilaian (*pre-market evaluation*) dengan cara melakukan sertifikasi sarana sebelum produk diajukan izin edarnya untuk mendapatkan rekomendasi. **Ke-dua**, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. **Ke-tiga**, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat. **Ke-empat**, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justicia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan

independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikator sasaran kegiatan ini pada Balai Besar POM di Palembang adalah sebagai berikut:

- Persentase Obat yang memenuhi syarat, dengan target sebesar 92,3% di tahun 2024
- Persentase Makanan yang memenuhi syarat, dengan target sebesar 86% di tahun 2024
- Persentase Obat yang berkualitas berdasarkan hasil pengawasan, dengan target sebesar 97% di tahun 2024
- Persentase Makanan yang berkualitas berdasarkan hasil pengawasan, dengan target sebesar 80% di tahun 2024

Indikator ini sekaligus sebagai salah satu ukuran keberhasilan tujuan BBPOM di Palembang yaitu “Meningkatnya kualitas Obat dan Makanan”.

Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari masing-masing indikator diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat

Defenisi:

- a. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017)
- b. Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Obat mencakup sampel Balai dan Loka.
- c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
 - 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
 - 2) Produk kadaluarsa
 - 3) Produk rusak
 - 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan
 - 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- d. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin d). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.

- e. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets
- f. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji.
- g. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS

Cara perhitungan sebagai berikut :

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.
- c. Sampel Obat mencakup sampel balai dan Loka.

Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat

Defenisi:

- a. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
- b. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)
- c. Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan Loka.
- d. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
 - 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
 - 2) Produk kadaluwarsa
 - 3) Produk rusak
 - 4) Tidak memenuhi ketentuan label

- 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- e. Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c). Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
- f. Jika termasuk poin c.1, c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK label, maka sampel tetap diuji.
- g. Jika ditemukan sampel makanan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS
- h. kesimpulan produk pangan random/acak adalah bahwa hasil evaluasi penandaan (MK atau TMK) mempengaruhi hasil kesimpulan akhir.

Cara perhitungan sebagai berikut :

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak Makanan MS}}{\text{Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.
- c. Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan Loka.

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Defenisi:

- a. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017)
- b. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Obat mencakup sampel Balai dan Loka.
- c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
 - 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu
 - 2) Produk kedaluwarsa
 - 3) Produk rusak
 - 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan

- 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- d. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin d). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
- e. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets
- f. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji.
- g. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS

Catatan:

- Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- Dalam pengambilan kesimpulan di wilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin C.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Koordinator.

Cara perhitungan sebagai berikut :

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.
- b. Dijui meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Defenisi:

- a. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
- b. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan

lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)

- c. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. **Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan Loka.**
- d. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.
- e. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label
- b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Catatan:

- Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- Dalam pengambilan kesimpulan di wilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Koordinator.

sampel targeted :

- a. pangan olahan berlabel : Evaluasi penandaan + diuji → kesimpulan produk : evaluasi penandaan tidak mempengaruhi hasil uji
- b. pangan olahan tidak berlabel : diuji aja (di spt semua harus melewati evaluasi penandaan(mk/tmk) jadi yg ga ada labelnya pilihannya MK label) → kesimpulan produk hasil sampling targeted: evaluasi penandaan tidak mempengaruhi hasil uji

Sasaran Kegiatan 2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Palembang

Dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BPOM melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) : “Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Palembang, dengan target sebesar 83 di tahun 2024.

Defenisi Operasional:

Kesadaran mencakup beberapa aspek yaitu:

1. Pengetahuan (Knowledge) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.
2. Sikap (Attitude) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi obat dan makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran obat atau obat tradisional palsu. Selanjutnya dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengkonsumsi obat & makanan yang benar. Ditambahkan pula penilaian masyarakat terhadap Badan POM yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.
3. Perilaku (Practices) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Badan POM.

Untuk menghitung indeks kesadaran masyarakat dilakukan metodologi survei.

Sasaran Kegiatan 3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat. Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Dari sisi pemerintah, BPOM bertugas menyusun kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan Risk Management Program oleh industri. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

Sebagai salah satu Lembaga pemerintah non kementerian, Balai Besar POM di Palembang berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BPOM, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, di sisi lain layanan publik BPOM bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

- Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang, dengan target sebesar 89 di tahun 2024.
- Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang, dengan target sebesar 83 di tahun 2024
- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang, dengan target sebesar 92 di tahun 2024

Defenisi Operasional:

- a. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan:
 1. Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BPOM.

2. Bimbingan dan pembinaan merupakan pemberian bimbingan teknis dan supervise yang mencakup sosialisasi/seminar, workshop/pelatihan/bimbingan teknis, asistensi/pendampingan/coaching clinic, konsultasi, focus group discussion (FGD).
3. Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan.
4. Aspek pengukuran dalam survey ini adalah:
 - 1). Aspek bimbingan dan pembinaan;
 - 2). Aspek tindak lanjut pasca bimbingan dan pembinaan;
 - 3). Aspek penanganan saran dan masukan;
 - 4). Aspek manfaat;
 - 5). Aspek dampak/pengaruh atas bimbingan dan pembinaan;
 - 6). Aspek pengetahuan dan pemahaman

Cara Perhitungan:

- a. Survei dilakukan secara *online* dan *paper based*, yaitu dengan melakukan *email blast* kepada seluruh pelaku usaha yang pernah mendapatkan bimbingan dan pembinaan oleh BPOM serta *email blast* kepada semua pelaku usaha yang terdaftar di BPOM. Selain itu survei juga dilakukan pada setiap kegiatan bimbingan atau pembinaan yang dilakukan pada tahun berjalan.
 - b. Target sampel dihitung dengan rumus Krejcie & Morgan dengan *margin of error* sebesar 2%.
 - c. Analisis dilakukan secara statistik-kuantitatif dengan persamaan regresi dan AHP sebagai penimbang.
 - d. Kriteria yang digunakan adalah:
 - 75,01 – 100: sangat puas
 - 50,01 – 75 : puas
 - 25,01 – 50 : kurang puas
 - 0 – 25: tidak puas
- b. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan:
1. Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1-4.
 2. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat.

3. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang diawasi oleh BPOM.
4. Indikator pembentuk terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu tangibles, realibility, responsiveness, assurance dan emphaty.
5. Untuk mengukur ke 5 (lima) indikator tersebut, ditetapkan melalui 2 (dua) pengukuran indeks yaitu:
 - a. Indeks kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (tangibles).
 - b. Indikator tidak langsung yaitu sejauh manakerja BPOM dalam melakukan pengawasan (realibility), tindakan (responsiveness) , memberikan perlindungan (assurance) dan kepedulian (emphaty) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat.

Cara Perhitungan:

- Melalui survei dengan metode *multi stage cluster random sampling* dengan *margin of error* 15%.
 - Responden adalah rumah tangga dengan kriteria usia 15-65 tahun.
 - Kriteria yang digunakan adalah:
 - 75,01 – 100: sangat puas
 - 50,01 – 75 : puas
 - 25,01 – 50 : kurang puas
 - 0 – 25: tidak puas
- c. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Palembang:
1. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik.
 2. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat.
4. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik)
5. Target dinyatakan dalam angka.

Cara Perhitungan:

Menghitung nilai terhadap hasil survei Kepuasan Masyarakat

Sasaran Kegiatan 4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Palembang

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (full spectrum) mencakup standarisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BBPOM di Palembang, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM akan meningkat efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. BPOM perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator kinerja utama (IKU) adalah sebagai berikut:

- Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, dengan target sebesar 95% di tahun 2024

- Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, dengan target sebesar 75% di tahun 2024
- Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dengan target sebesar 97% di tahun 2024
- Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target sebesar 70% di tahun 2024
- Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan, dengan target sebesar 71% di tahun 2024
- Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Balai Besar POM di Palembang, dengan target sebesar 4,51 di tahun 2024.

Defenisi Operasional:

- a. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan:
 1. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi.
 2. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
 3. Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:
 - 1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
 - 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
 - 3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat
 - 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
 4. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
 - 1) Pelaku usaha;

- 2) Lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)
- b. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder:
 1. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.
 2. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.
 3. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
 - pelaku usaha;
 - lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)
 4. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
 5. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.
PERHATIKAN: Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan.
- c. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu:
 1. Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:
 - a) Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT
 - b) Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk
 - c) Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik
 - d) Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar
 - e) Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB
 - f) Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan

- g) Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK
- h) Sertifikat hasil pengujian sampel pihak ketiga
- 2. Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.
- d. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan
 - Sarana Produksi Obat

Sarana produksi Obat adalah sarana produksi obat, bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus (misalnya: unit transfusi darah, fasilitas radiofarmaka, laboratorium sel punca dan instalasi farmasi rumah sakit).

 - ✓ Memenuhi Ketentuan adalah apabila tidak ada temuan kritikal pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindaklanjutnya berupa Perbaikan.
 - Sarana Produksi OT

Sarana produksi Obat Tradisional mencakup IOT, UKOT dan U MOT. Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila:

 - ✓ Untuk sarana IOT: tidak ada temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.
 - ✓ Untuk sarana UKOT dan U MOT: tidak ada temuan kritis atau sanitasi higien major.

Catatan: Pemeriksaan sarana UKOT dan U MOT akan menggunakan form yang berbeda dengan sarana produksi IOT
 - Sarana Produksi Kosmetik

Sarana produksi kosmetik mencakup Industri Kosmetik golongan A dan B.

 - ✓ Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila tidak ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.
 - Sarana produksi Suplemen Kesehatan

Sarana produksi Suplemen Kesehatan mencakup IOT, UKOT (GMP), Industri Farmasi (Fasber) dan Industri Pangan.

 - ✓ Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila tidak ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.
 - Sarana Produksi Pangan

Sarana produksi pangan mencakup sarana produksi MD dan IRTP/UMKM. Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila:

 - ✓ Sarana produksi pangan MD yang memperoleh rating A dan B.
 - ✓ Sarana produksi IRTP/UMKM memperoleh level 1 dan 2.

Catatan: Pemeriksaan sarana IRTP/UMKM menggunakan form pemeriksaan yang berbeda dengan sarana produksi (industri) pangan

PERHATIKAN: Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada pedoman

- e. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan
 - 1. Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin).
 - 2. Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:
 - a) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat
 - b) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OT, Kos dan SK (juklak.....)
 - c) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan
 - d) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

f. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik

- 1. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:
 - a. Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
 - b. Profesionalitas SDM (18%);
 - c. Sarana Prasarana (15%);
 - d. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
 - e. Konsultasi dan Pengaduan (15%);
 - f. Inovasi (7%).
- 2. Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Cara Perhitungan:

- a. Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM
- b. Kategori nilai:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (<i>Dengan Catatan</i>)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (<i>Dengan Catatan</i>)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Sasaran Strategis 5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang

Pengawasan Obat dan Makanan ke depannya lebih preventif dan proaktif, di antaranya melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan serta pemberdayaan masyarakat agar masyarakat mampu melindungi diri dari produk obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan. Komunikasi, informasi dan edukasi tentang obat dan makanan diharapkan dapat membekali pengetahuan kepada masyarakat tentang produk obat, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, dan pangan yang aman untuk dikonsumsi. Dengan peningkatan efektivitas komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat dapat mengunggah komunitas desa, pasar dan komunitas sekolah supaya berdaya, berpartisipasi dan mandiri dalam pembinaan dan pengawasan keamanan pangan di komunitasnya masing-masing.

Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) :

- Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan, dengan target sebesar 84% di tahun 2024
- Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, dengan target sebesar 104 di tahun 2024
- Jumlah desa pangan aman, dengan target sebesar 32 di tahun 2024
- Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya, dengan target sebesar 17 di tahun 2024

Defenisi Operasional:

- a. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan
 1. Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).
 2. Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:
 - a) KIE melalui media cetak dan elektronik;
 - b) KIE langsung ke masyarakat; dan
 - c) KIE melalui media sosial
 3. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:
 - a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
 - b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
 - c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
 - d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan
 4. Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir.
 5. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisisioner dan online survey

Cara Perhitungan:

Diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan

- b. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman
 1. Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA
 2. Intervensi utama yang dilakukan berupa bimbingan teknis keamanan pangan terhadap siswa dan guru. Selain itu akan dilakukan pendampingan yang lebih intensif untuk memastikan bahwa sekolah tersebut menerapkan persyaratan keamanan pangan, dan juga kegiatan sampling PJAS di kantin dan pedagang sekitar sekolah sebelum dan sesudah intervensi dilakukan.

3. Tujuan dari intervensi ini untuk memastikan agar sekolah aman dari PJAS yang mengandung bahan berbahaya serta memiliki kemandirian dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keamanan pangan di sekolah khususnya dikantin sekolah.

Dihitung berdasarkan jumlah sekolah baru yang mendapatkan penghargaan atas penerapan persyaratan keamanan pangan mengacu pada Juknis Piagam Bintang Keamanan Pangan.

Realisasi triwulanan dihitung berdasarkan progress tahapan:

1. ... (bobot ...%)
2. ... (bobot ...%)

c. Jumlah desa pangan aman

1. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, desa yang menjadi lokasi intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata
2. Desa Maju adalah Desa dengan IDM $> 0,707$ dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707 , IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi
3. Desa pangan aman adalah desa yang memiliki :
 - a) kader keamanan pangan desa yang aktif
 - b) Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
 - c) Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain

Cara Perhitungan:

Dihitung dari Jumlah desa yang :

Desa pangan aman adalah desa yang memenuhi kriteria poin C.

d. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya

1. Pasar adalah pasar tradisional yang diusulkan oleh daerah sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar aman dari bahan berbahaya
2. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan pedoman implementasi program pasar aman dari bahan berbahaya dalam rangka mencapai pasar aman dari bahan berbahaya

3. Pasar aman dari bahan berbahaya adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait untuk mengendalikan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survey pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar aman dari bahan berbahaya, serta pelatihan fasilitator pasar aman dari bahan berbahaya.
4. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya dan rencana program pengawalan pada tahun berikutnya
5. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.
6. Kriteria Pasar Aman meliputi :
 - ✓ Mendapat intervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya
 - ✓ Terjadi penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta
 - ✓ Mempunyai rencana program pengawalan pada tahun berikutnya.
 - ✓ Cara Perhitungan:
 - ✓ Dihitung dari Jumlah pasar yang memenuhi kriteria poin F

Sasaran Kegiatan 6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah BBPOM di Palembang.

Untuk melihat konsistensi mutu produk, dilakukan pengawasan melalui pemeriksaan yang meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan dan penandaan label yang dilanjutkan dengan pengujian laboratorium secara kimia, biologi, dan mikrobiologi terhadap produk yang disampling oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang. Pengujian produk secara laboratorium dilakukan menggunakan metode analisis terkini mengacu pada standar nasional dan internasional. Jenis produk berkembang sangat pesat, sehingga tidak semua metode analisis yang dibutuhkan telah tersedia pada buku standar tersebut atau tidak semua metode analisis pada buku standar dapat digunakan dalam pengujian produk. Dalam mengawal mutu dan keamanan produk perlu dikembangkan

metode analisis yang disesuaikan dengan profil dan matriks sampel. Dalam validasi metode analisis dan pengujian diperlukan baku pembandingan sebagai penentu validitas metode dan hasil pengujian, sedangkan di pasaran tidak selalu tersedia baku pembandingan yang dibutuhkan. Semua sampel yang berasal dari sampel prioritas sampling dan sampel dari pihak ke-3 juga dituntut untuk diselesaikan tepat waktu. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator kinerja utama (IKU):

- Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target sebesar 94% di tahun 2024
- Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target sebesar 85% di tahun 2024

Defenisi Operasional:

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Pada perhitungan persentase sampel yang diperiksa dan diuji sesuai standar,

$\frac{\text{jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar}}{\text{jumlah target sampel obat}}$, yang dimaksud jumlah target sampel obat

adalah jumlah target sampel obat selama 1 tahun. Serta yang dimaksud jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar adalah obat yang sudah selesai diuji di lab.

- a. Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen Kesehatan
- b. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Obat mencakup Balai dan Loka.
- c. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP
- d. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.
- e. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

- a. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Obat mencakup Balai dan Loka.
- b. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP
- c. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,

- d. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Sasaran Kegiatan 7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang.

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar. Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan BPOM menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menjangkau ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh BPOM melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu : Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, dengan target sebesar 75 di tahun 2024.

Defenisi Operasional:

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Terdapat kasus carry over SPDP November tahap berikutnya ke 2020, SPDP capaian 2019. Jika dimasukkan ke 2020 tidak double klaim karena perhitungan carry over adalah capaian tambahan. Pada rumus jika pembilangnya bertambah maka penyebut juga bertambah.

1. Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
2. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT.

Tahapan Penindakan antara lain:

- a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)

- b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
 - c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
 - d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)
3. Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Penilaian Persentase Keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- a. SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{Jumlah perkara}]$
- b. Tahap I sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- c. P21 sebesar 30% dan -- nilai C $[(c+d) / \text{Jumlah perkara}]$
- d. Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D $[d / \text{jumlah perkara}]$

Nilai Tingkat keberhasilan =

$$\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times \frac{\text{Jumlah capaian}}{\text{Target perkara}}$$

Sasaran Kegiatan 8. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di lingkup Balai Besar POM di Palembang yang optimal.

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPOM. Pada tahun 2020-2024, BPOM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan

target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran. Sumber daya, yang meliputi 5 M (man, material, money, method, and machine) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BPOM untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi. Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas system dan prosedur kerja. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut :

- a. Indeks RB Balai Besar POM di Palembang, hingga akhir tahun 2024 ditargetkan 95;
- b. Nilai AKIP Balai Besar POM di Palembang, hingga akhir tahun 2024 ditargetkan 92.

Defenisi Operasional:

a) Indeks RB Balai Besar POM di Palembang

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.

1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen

SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

1. Manajemen Perubahan : bobot 5%
2. Penataan Tatalaksana : bobot 5%
3. Penataan Sistem Manajemen SDM : bobot 15%
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja : bobot 10%
5. Penguatan Pengawasan : bobot 15%
6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik : bobot 10%

Rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN : bobot 20%
2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat : bobot 20%

Cara Perhitungan:

Penjumlahan bobot komponen pengungkit dan bobot komponen hasil.

b) Nilai AKIP Balai Besar POM di Palembang

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP): SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama. Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian antara lain:

1. Perencanaan Kinerja (30%) meliputi aspek:
 - a. Rencana Strategis (10%) meliputi pemenuhan renstra (2%), kualitas renstra (5%) dan implementasi renstra (3%)
 - b. Perencanaan kinerja tahunan (20%) meliputi pemenuhan RKT (4%), kualitas RKT (10%) dan implementasi RKT (6%)
2. Pengukuran Kinerja (25%) meliputi aspek:
 - a. Pemenuhan pengukuran (5%);
 - b. Kualitas pengukuran (12,5%);
 - c. Implementasi pengukuran (7,5%)

3. Pelaporan Kinerja (15%) meliputi aspek: a. Pemenuhan pelaporan (3%); b. Kualitas pelaporan (7,5%); c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
4. Evaluasi Internal (10%) meliputi aspek:
 - a. Pemenuhan evaluasi (2%); b. Kualitas evaluasi (5%); c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
5. Capaian Kinerja (20%) meliputi aspek: a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%); b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%); c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%).

Cara Perhitungan:

Penjumlahan 5 komponen penilaian evaluasi AKIP.

Rentang nilai evaluasi AKIP terdiri dari:

1. AA (Sangat Memuaskan) dengan nilai >90-100
2. A (Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel) dengan nilai >80-90
3. BB (Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal) dengan nilai >70-80
4. B (Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan) dengan nilai >60-70
5. CC (Cukup (Memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar) dengan nilai >50-60
6. C (Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar) dengan nilai >30-50
7. D (Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar) dengan nilai 0-30.

Sasaran Kegiatan 9. Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Palembang yang berkinerja optimal

SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus

sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) : Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Palembang, hingga akhir tahun 2024 ditargetkan 91.

Defenisi Operasional:

- a) Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
- b) Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.
- c) Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:
 - 1. Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
 - 2. Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
 - 3. Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
 - 4. Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuan hukuman disiplin yang pernah dialami

Catatan: Form Survei disiapkan oleh Biro Umum dan SDM.

Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

- a. kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
- b. kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
- c. kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
- d. disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

- a. Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;
- b. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;

- c. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;
- d. Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
- e. Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

Sasaran Kegiatan 10. Menguatnya laboratorium , data dan informasi pengawasan obat dan makanan

Pemenuhan standar GLP adalah sebagai upaya Laboratorium pengujian Balai Besar POM di Palembang untuk memenuhi Standar Laboratory Practice (GLP) yang meliputi parameter standar ruang lingkup, standar alat laboratorium dan standar kompetensi personal laboratorium, alat laboratorium yang digunakan harus terkalibrasi dan dipelihara dengan baik.

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium serta sistem operasional teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan online. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era internet of things.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPOM di era digital ini. Pada Renstra 2015-2019, BPOM telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan database-nya belum di-update secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK BPOM.

Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah :

- Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP, dengan target sebesar 90% di tahun 2024
- Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal, dengan target sebesar 3,00 di tahun 2024

Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

Yang maksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar *Good Laboratory Practice* (GLP) yang meliputi parameter Standar

Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium.

Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional

Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:

- Standar Ruang Lingkup > 65,
- Standar Kompetensi personel laboratorium > 75,
- Standar Alat Laboratorium > 70

Cara Perhitungan:

- Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional

Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutahirkan di BCC
 - Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
 - Yang dimaksud dimutahirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutahirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
 - BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan
 - Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
 - Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutahirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutahirkan sebagai berikut:
 1. UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracunan
 2. Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir)

2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:

- Balai : email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai
- Pusat : email dan dashboard BCC

Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional

Kriteria yang digunakan adalah:

2,26 – 3: Optimal

1,51 – 2,25 : Cukup

0,76 – 1,5 : Kurang Optimal

0 – 0,75: Sangat Kurang

Sasaran Kegiatan 11. Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Palembang secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam Learning and Growth Perspective yang menggambarkan kemampuan Balai Besar POM di Palembang dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke-12, dengan ukuran keberhasilannya adalah sebagai berikut :

- a. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Palembang, hingga akhir tahun 2020 ditargetkan 93,4;
- b. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Palembang, hingga akhir tahun 2020 ditargetkan 90,00.

Defenisi Operasional:

- a. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Palembang:
 1. Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.
 3. 13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:
 - 1) Revisi DIPA; 2) Deviasi Halaman III DIPA; 3) Pengelolaan UP; 4) Rekon LPJ Bendahara; 5) Data Kontrak; 6) Penyelesaian Tagihan; 7) Penyerapan Anggaran; 8) Retur SP2D; 9) Perencanaan Kas (Renkas); 10) Pengembalian/Kesalahan SPM; 11) Dispensasi Penyampaian SPM; 12) Pagu Minus; 13) Konfirmasi Capaian Output.
- b. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Palembang**
1. Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.
 2. Indeks efisiensi (IE) Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input: $IE = (\% \text{capaian output}) / (\% \text{capaian input})$
 3. Standar efisiensi (SE) adalah 1
 4. Tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). $TE = (IE - SE) / SE$
 5. Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien.
 6. Kriteria:
 - Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1
 - Tidak efisien apabila $TE < 0$ atau $TE > 1$

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021

Balai Besar POM di Palembang telah menyusun dokumen rencana kinerja tahunan tahun 2020-2024 mengacu pada Renstra Balai Besar POM di Palembang 2020-2024. Rencana Kinerja Tahunan memuat sasaran (kinerja/hasil), indikator, dan target kinerja tahunan yang akan dicapai serta strategi (program/kegiatan) untuk mencapai sasaran tersebut, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan pengajuan usulan kegiatan dan anggaran Balai Besar POM di Palembang T.A 2021. Pada dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat 11 sasaran kegiatan dengan 28 indikator kinerja kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar

POM di Palembang Tahun 2021 versi Renstra yang telah ditandatangani oleh dapat dilihat pada Lampiran 2 pada Laporan Kinerja ini.

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh Balai Besar POM di Palembang. Perjanjian Kinerja terdiri dari format yang menghubungkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran. Pada akhir tahun 2020 telah disusun Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Palembang Tahun 2021. Pada dokumen Perjanjian Kinerja 2020 memuat 11 sasaran kegiatan dengan 28 indikator kinerja kegiatan. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Palembang tahun 2021 yang sudah ditandatangani dapat dilihat pada Lampiran 3 pada Laporan Kinerja Interim ini.

Adapun Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Palembang akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,60
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80,00
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95,00
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76,00
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	75,00
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan	87,00

**BAB II PERENCANAAN KINERJA
LAPKIN INTERIM TRIWULAN I
TAHUN 2021**

	di Palembang	Makanan	
		Indeks kepuasan masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	74,00
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Palembang	90,00
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89,00
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60,00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88,00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00
		Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan	3,76
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	92,50
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40
		Jumlah desa pangan aman	12
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	6
6	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85,00
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standard	77,00

**BAB II PERENCANAAN KINERJA
LAPKIN INTERIM TRIWULAN I
TAHUN 2021**

7	Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan	58,00
8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di lingkup Balai Besar POM di Palembang yang optimal	Indeks RB BBPOM di Palembang	89,00
		Nilai AKIP BBPOM di Palembang	8500
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Palembang yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN BBPOM di Palembang	82,00
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	75,00
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Palembang yang optimal	2,00
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Palembang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Palembang	94,00
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Palembang	Efisien (92%)

Tabel.3. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Palembang Tahun 2021

Kegiatan

- Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia
- Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

Anggaran

Rp. 20.096.949.000,00
Rp. 15.236.112.000,00

Dalam menerima amanah dari pimpinan untuk melaksanakan program/kegiatan yang telah diperjanjikan, Balai Besar POM di Palembang menerima anggaran sebesar Rp.35.333.061.000,00.

2.4.Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2021

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Palembang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN
			B3	B6	B9	B12*	(Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,60%	83,60%	83,60%	83,60%	Rp 468.274.500
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	Rp 252.052.000

**BAB II PERENCANAAN KINERJA
LAPKIN INTERIM TRIWULAN I
TAHUN 2021**

	di Palembang	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	Rp 468.274.500
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76,00%	76,00%	76,00%	76,00%	Rp 252.052.000
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	0	0	0	75	Rp 124.000.000
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	0	0	0	87	Rp 144.630.400
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	0	0	0	74	Rp 183.168.800
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	0	0	0	90,00	Rp 50.645.00
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Palembang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89,00%	89,00%	89,00%	89,00%	Rp 53.458.100
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	Rp 53.458.100
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88,00%	88,00%	88,00%	88,00%	Rp 264.840.00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%	Rp 75.887.000
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00%	63,00%	63,00%	63,00%	Rp 427.664.800

**BAB II PERENCANAAN KINERJA
LAPKIN INTERIM TRIWULAN I
TAHUN 2021**

		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Palembang	0	0	0	3,76	Rp 66.210.000
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	-	92,50	92,50	92,50	Rp 1.350.000
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	0	20,00%	75,00%	40	Rp 578.521.600
		Jumlah desa pangan aman	0	25,00%	75,00%	12	Rp 732.675.200
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	0	15,00%	75,00%	6	Rp 202.580.000
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20,00%	40,00%	60,00%	85,00%	Rp 1.199.099.400
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20,00%	40,00%	60,00%	77,00%	Rp 799.399.600
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	20,00%	35,00%	45,00%	58,00%	Rp 933.518.000
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan di lingkup BBPOM di Palembang yang optimal	Indeks RB UPT	0	0	0	89	Rp 2.757.738.300
		Nilai AKIP UPT	0	0	0	85	Rp 3.676.984.400
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Palembang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	0	0	0	82	Rp 2.757.738.300
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	0,00%	0,00%	0,00%	75,00%	Rp 8.267.730.000
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	0	2,00	2,00	2,00	Rp 3.676.984.400
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Palembang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	30	60	80	94	Rp 3.676.984.400
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	Efisien (92,00%)	Efisien (92,00%)	Efisien (92,00%)	Efisien (92,00%)	Rp 1.838.492.200

Tabel 4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2021

2.5 METODE PENGUKURAN & KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR

Pengukuran Kinerja Balai Besar POM di Palembang dilakukan dengan berpedoman pada Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama yang telah dijelaskan pada Indikator Kinerja Utama Balai Besar POM di Palembang yang dikumpulkan oleh Penanggungjawab data Monev yang ada di Sub Koordinator Substansi Program & Evaluasi dengan berkoordinasi dengan personel yang telah ditugaskan oleh Koordinator/Sub Koordinator masing-masing.

Kriteria pengukuran dari hasil capaian terhadap target adalah sebagai berikut:

Kriteria	Rentang Capaian (Existing)	Rentang Capaian Lapkin 2020 TW1
Sangat Kurang		<50%
Kurang	< 75	$50\% \leq x < 70\%$
Cukup	75 - 100	$70\% \leq x < 90\%$
Baik	100	$90\% \leq x < 110\%$
Sangat Baik	100-125	$110\% < x \leq 120\%$
Tidak dapat disimpulkan	> 125	> 120%

Tabel 5.
Kriteria Penilaian Capaian Kinerja

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis BBPOM di Palembang guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja Triwulan I Tahun 2021 terhadap target yang telah ditetapkan, membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja Triwulan I Tahun 2021 dengan tahun lalu dan membandingkan realisasi kinerja Triwulan I Tahun 2021 terhadap capaian kinerja terhadap target pusat (BPOM), analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya serta melakukan analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Berdasarkan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Triwulan I Tahun 2021 penetapan kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Triwulan I Tahun 2021 memuat 11 (sebelas) Sasaran Kegiatan. Pencapaian semua Sasaran Kegiatan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Triwulan I Tahun 2021 yang merupakan periode tahun pertama dari periode Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Triwulan I Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Kegiatan	Nilai Capaian Sasaran (%)	Kriteria	Rata-rata Perspektif (%)
Sasaran Kegiatan Kategori Stake Holder Perspektif (Rata - Rata Capaian Sasaran Kegiatan 1, 2 dan 3)				104,67
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	104,67	Baik	104,67
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di	0	-	-

	Palembang			
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	0	-	-
Sasaran Kegiatan Kategori Internal Perspektif (Rata - Rata Capaian Sasaran Kegiatan 4, 5, 6 dan 7)				123,16%
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	92,97%	Baik	92,97%
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	0	-	-
6.	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	119,18%	Sangat Baik	119,18%
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	157,32%	Tidak Dapat Disimpulkan	157,32%
Sasaran Kegiatan Kategori Learning and Growth Perspektif (Rata - Rata Capaian Sasaran Kegiatan 8, 9, 10 dan 11)				81,52%
8.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang optimal	0	-	-
9.	Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang berkinerja optimal	0	-	-
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	0	-	-
11.	Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang secara Akuntabel	81,52%	Cukup	81,52%

RATA-RATA CAPAIAN SASARAN KEGIATAN	BAIK	103,11
---	-------------	---------------

Tabel 6.
Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Triwulan I Tahun 2021
Analisis Akuntabilitas Kinerja

Sasaran Kegiatan yang ditetapkan diukur dengan 28 Indikator Kinerja Utama. Secara lengkap perbandingan target, realisasi dan capaian setiap Indikator Kinerja utama dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	83,60	96,44	115,36
		2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	80	94,29	117,86
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95	100	105,26
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76,00	60,95	80,20
2	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	5. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	0	0	0
3	Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat Terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan	6. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	0	0	0

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	7. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	0	0	0
		8. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	0	0	0
4.	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan Serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	9. Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	89	92,92	104,41
		10. Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan	60	17,72	29,53
		11. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	88	100	113,64
		12. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	55	62,16	113,02
		13. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	63	65,69	104,26
		14. Indeks Pelayanan Publik di Bidang Obat dan Makanan	0	-	-
5.	Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM	15. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	0	-	-
		16. Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	0	3%	-
		17. Jumlah Desa Pangan Aman	0	17%	-

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
	di Palembang	18.	Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	0	10%	-
6.	Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang Optimal	19.	Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	20	23,33	116,65
		20.	Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	20	24,34	121,70
7.	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	21.	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	20	31,46	157,32
8.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang Optimal	22.	Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	0	0	-
		23.	Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	0	0	-
9.	Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang Berkinerja Optimal	24.	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	0	0	-
10.	Menguatnya Laboratorium,	25.	Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat	0	0	-

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
	pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	dan Makanan Sesuai Standar GLP			
		26. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal	0	0	-
11.	Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Secara Akuntabel	27. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	30	0	-
		28. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	Efisien (92%)	Efisien (75%)	81,52

Tabel 7.
Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama Triwulan I Tahun 2021

Sebagai salah satu upaya pengawalan pencapaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2021 BBPOM di Palembang telah melakukan cascading Indikator Kinerja dari level Eselon II hingga ke level staf. Cascading ini selain dalam bentuk Perjanjian Kinerja individu juga cascading dalam bentuk SKP yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja. Data dapat dilihat pada Lampiran 6 (contoh Perjanjian Kinerja Eselon III, IV dan Staf). Evaluasi SKP BBPOM di Palembang telah dilakukan setiap Triwulan secara online. Nilai SKP Triwulan I Tahun 2021 begitu juga dengan nilai capaian Perjanjian Kinerja individu telah dijadikan dasar dalam pemberian tunjangan kinerja dan *reward & punishment*.

Analisis Akuntabilitas Kinerja (Penjelasan Capaian Sasaran Strategis) :

Dari 28 (dua puluh delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU), terdapat 5 (lima) indikator yang dengan kriteria Sangat Baik, sebanyak 3 (tiga) indikator dengan kriteria Baik, 2 (dua) indikator mempunyai capaian melebihi 120% dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan, 2(dua) indicator dengan kriteria CUKUP dan 1 (satu) indikator dengan kriteria Sangat Kurang serta 15(lima belas) indicator yang tidak dapat dihitung di Triwulan I. Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing - masing Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan oleh BBPOM di Palembang, adalah sebagai berikut :

3.1.1. PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN I

1. TERWUJUDNYA OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT DI WILAYAH KERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 4 Indikator Kinerja Utama, yaitu :

1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Target, Realisasi dan Capaian Indikator ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Indikator Kinerja	Target TW1 2021	Realisasi TW1 2021	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	83,60	96,44	115,36	Sangat Baik

Tabel 8.

Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Triwulan I Tahun 2021

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2021

Realisasi persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Selatan pada Triwulan I Tahun 2021 adalah 96,44% bila dibandingkan dengan target 83,60%, maka capaian yang diperoleh sebesar 115,36% dan mendapatkan kriteria Sangat Baik. Pada Triwulan I Tahun 2021 ditemukan 9 sampel Tidak Memenuhi Syarat dari 253 sampel yang telah selesai dilakukan pengujian.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2021 terhadap Target Tahun 2021

Realisasi dan capaian persentase Obat yang Memenuhi Syarat Triwulan I adalah 96,44% bila dibandingkan dengan target tahun 2021 83,60%, maka capaian yang diperoleh sebesar 115,36% dan mendapatkan kriteria Sangat Baik.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan.

1. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha baik di tingkat produksi maupun distribusi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kemampuan uji Balai Besar POM di Palembang yang terus ditingkatkan sesuai dengan persyaratan parameter uji kritis pada tahun berjalan

3. Tingginya persentase Obat MS Triwulan I Tahun 2021 menunjukkan bahwa mutu obat yang beredar di wilayah kerja BBPOM di Palembang sudah baik. Hal ini dimungkinkan karena adanya pengawasan yang dilakukan secara insentif dan berkelanjutan, termasuk pengawalan oleh Pemerintah Daerah

d. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program / Kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Obat yang Memenuhi Syarat, antara lain :

1. Kepatuhan pelaksanaan sampling dan pengujian sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian pada Triwulan I Tahun 2021.
2. Peningkatan kemampuan uji Balai Besar POM di Palembang sesuai dengan persyaratan Parameter Uji Kritis pada tahun berjalan.
3. Pengadaan alat laboratorium setiap tahun sesuai kebutuhan dan persetujuan dari P3OMN untuk memenuhi standar minimum alat laboratorium.
4. Pemenuhan sarana penunjang pengujian (reagensia, baku pembanding, suku cadang, kebutuhan ruangan dan listrik, dll)
5. KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) secara rutin melalui kegiatan pelatihan / bimtek / sosialisasi kepada pelaku usaha, masyarakat serta Pemda
6. Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi yang secara rutin untuk memberikan pembinaan dan pengawalan dalam penjaminan mutu produk Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan
7. Telah dilakukan audit sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik terhadap PBF, sehingga pihak sarana terus berupaya untuk memenuhi persyaratan CDOB yang ditetapkan secara maksimal. Hal ini berdampak pada meningkatnya jaminan mutu obat yang didistribusikan.

e. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya.

1. Peningkatan kemampuan uji laboratorium pada Triwulan I Tahun 2021 dilakukan dengan melakukan peningkatan SRL pengujian sesuai dengan roadmap peningkatan SKL
2. Peningkatan kompetensi SDM telah dilakukan dengan mengikuti pelatihan / bimtek / seminar online terkait pengujian

3. Peningkatan awareness / kesadaran pelaku usaha melalui pelatihan, bimtek dan pemberian informasi serta Intensifikasi Pengawasan di bidang Obat dan Makanan.
4. Peningkatan layan informasi dan pengaduan konsumen baik secara langsung, telp, WA, email dan pemanfaatan media sosial sehingga masyarakat menjadi lebih cerdas dan bijak dalam memilih Obat yang aman dan bermutu

2. Presentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Target, Realisasi dan Capaian Indikator ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Indikator Kinerja	Target TW1 2021	Realisasi TW1 2021	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	80,00	94,29	117,86	Sangat Baik

Tabel 9.

Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Triwulan I Tahun 2021

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2021

Realisasi Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Selatan pada Triwulan I Tahun 2021 adalah 94,29% dari target 80%, dengan demikian capaian BBPOM Palembang untuk indikator ini sebesar 117,86% dan masuk dalam kriteria Sangat Baik. Pada Triwulan I Tahun 2021 jumlah Makanan yang Tidak Memenuhi Syarat sebanyak 2 sampel dari 35 sampel yang telah selesai dilakukan pengujian

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2021 terhadap Target Tahun 2021

Realisasi Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Selatan pada Triwulan I Tahun 2021 adalah 94,29% dari target tahun 2021 80%, dengan demikian capaian BBPOM Palembang untuk indikator ini sebesar 117,86% dan masuk dalam kriteria Sangat Baik.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

1. Kepatuhan pelaksanaan sampling dan pengujian sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian Triwulan I Tahun 2021.

2. Kemampuan uji Balai Besar POM di Palembang yang terus ditingkatkan sesuai dengan persyaratan Parameter Uji Kritis pada tahun berjalan.
3. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha baik di tingkat produksi maupun distribusi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Tingginya persentase Makanan yang MS Triwulan I Tahun 2021 menunjukkan bahwa mutu Makanan yang beredar di wilayah kerja BBPOM di Palembang sudah baik. Hal ini dimungkinkan karena adanya pengawasan yang dilakukan secara insentif dan berkelanjutan, termasuk pengawalan oleh Pemerintah Daerah.

d. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Pelaksanaan sampling dan pengujian sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian Triwulan I Tahun 2021.
2. Peningkatan kemampuan uji Balai Besar POM di Palembang sesuai dengan persyaratan parameter uji kritis pada tahun berjalan.
3. Pemenuhan kebutuhan alat dan sarana penunjang pengujian (reagensia, baku pembanding, suku cadang, kebutuhan ruangan dan listrik, dll)
4. KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) secara rutin melalui kegiatan pelatihan / bimtek / sosialisasi kepada pelaku usaha, masyarakat serta Pemda
5. Pengawasan yang dilakukan secara rutin di sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang dilakukan, termasuk pengawalan oleh Pemda Kab / Kota

e. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya.

1. Peningkatan kemampuan uji laboratorium pada Triwulan I Tahun 2021 dilakukan dengan peningkatan SRL pengujian sesuai dengan roadmap peningkatan SKL
2. Peningkatan kompetensi SDM melalui kegiatan pelatihan / bimtek / seminar online terkait teknik pengujian

3. Peningkatan awareness / kesadaran pelaku usaha melalui pelatihan, bimtek dan pemberian informasi serta Intensifikasi Pengawasan di bidang Obat dan Makanan.
4. Peningkatan layan informasi dan pengaduan konsumen baik secara langsung, telp, WA, email dan pemanfaatan media sosial sehingga masyarakat menjadi lebih cerdas dan bijak dalam memilih Makanan yang aman dan bermutu.

3. Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Target, Realisasi dan Capaian Indikator ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Indikator Kinerja	Target TW1 2021	Realisasi TW1 2021	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	95,00	100	105,26	Baik

Tabel 10.

Capaian kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Triwulan I Tahun 2021

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2021

Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan di Provinsi Sumatera Selatan pada Triwulan I Tahun 2021 adalah 100% bila dibandingkan dengan target 95,00%, maka capaian yang diperoleh sebesar 105,26% dan masuk dalam kriteria Baik. Pada Triwulan I Tahun 2021 jumlah Obat sampel targeted yang telah selesai uji sebanyak 37 sampel.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2021 terhadap Target Tahun 2021

Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan di Provinsi Sumatera Selatan pada Triwulan I Tahun 2021 adalah 100% bila dibandingkan dengan target tahun 2021 95,00%, maka capaian yang diperoleh sebesar 105,26% dan masuk dalam kriteria Baik.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

1. Kepatuhan pelaksanaan sampling dan pengujian sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian Triwulan I Tahun 2021.
2. Kemampuan uji Balai Besar POM di Palembang yang terus selalu ditingkatkan sesuai dengan persyaratan parameter uji kritis pada tahun berjalan.
3. Tingkat pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha dan masyarakat tentang Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat meningkat, sehingga produk yang beredar di pasaran dan yang dikonsumsi masyarakat merupakan Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat.
4. Pengawasan terhadap produk Obat di sarana produksi dan sarana distribusi yang selalu dilaksanakan secara rutin, menerapkan *risk base inspection* dan *track record* sarana untuk dapat mendeteksi adanya produk Obat dan Makanan yang Tidak Memenuhi Syarat beredar di masyarakat dan di tingkat produsen.

d. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program / kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Obat yang Memenuhi Syarat, antara lain :

1. Pelaksanaan sampling dan pengujian yang dilakukan berpedoman pada Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Triwulan I Tahun 2021.
2. Peningkatan kemampuan uji Balai Besar POM di Palembang sesuai dengan persyaratan parameter uji kritis pada tahun berjalan.
3. Pengadaan alat laboratorium untuk memenuhi standar minimum alat laboratorium.
4. Pemenuhan sarana penunjang pengujian (reagensia dan media mikrobiologi, baku pembanding, suku cadang, kebutuhan ruangan dan listrik, dll)
5. Penyebaran informasi dan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat ataupun pihak sarana terkait Obat dan Makanan
6. Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi yang secara rutin dilaksanakan untuk melihat sekaligus memberikan pembinaan dalam penjaminan mutu produk Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan

7. Telah dilakukan audit sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik terhadap PBF, sehingga pihak sarana berupaya untuk memenuhi persyaratan CDOB yang ditetapkan secara maksimal. Hal ini berdampak pada meningkatnya jaminan mutu obat yang didistribusikan

e. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya.

1. Peningkatan kemampuan uji laboratorium pada Triwulan I Tahun 2021 dilakukan dengan peningkatan SRL pengujian sesuai dengan roadmap peningkatan SKL
2. Peningkatan kompetensi SDM melalui kegiatan pelatihan / bimtek / seminar online terkait teknik pengujian
3. Peningkatan awareness / kesadaran pelaku usaha melalui pelatihan, bimtek dan pemberian informasi serta Intensifikasi Pengawasan di bidang Obat dan Makanan.

4. Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Target, Realisasi dan Capaian Indikator ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Indikator Kinerja	Target TW1 2021	Realisasi TW1 2021	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	76,00	60,95	80,20	Cukup

Tabel 11.

Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Triwulan I Tahun 2021

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2021

Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan di Provinsi Sumatera Selatan pada Triwulan I Tahun 2021 adalah 60,95% bila dibandingkan dengan target 76,00% maka capaian BBPOM Palembang untuk indikator kinerja tersebut adalah 80,20% dengan kriteria Cukup. Pada Triwulan I Tahun 2021 ditemukan 41 sampel yang Tidak Memenuhi Syarat dari 105 sampel yang telah selesai dilakukan pengujian.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2021 terhadap Target Tahun 2021

Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan di Provinsi Sumatera Selatan pada Triwulan I Tahun 2021 adalah 60,95% bila dibandingkan dengan target tahun 2021 sebesar 75,00%, maka capaian BBPOM Palembang untuk indikator kinerja tersebut adalah 81,27% dengan kriteria Cukup.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

1. Kepatuhan pelaksanaan sampling dan pengujian sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian Triwulan I Tahun 2021. Pada Triwulan I tahun 2021 telah dilakukan sampling dan pengujian sampel fortifikasi sebanyak 80 sampel dari total target 1 tahun sebanyak 95 sampel. Sampel fortifikasi ini menyumbang jumlah TMS uji yang besar, yaitu 38 sampel TMS dari 80 sampel yang sudah selesai uji.
2. Kemampuan uji Balai Besar POM di Palembang yang terus ditingkatkan sesuai dengan persyaratan parameter kritis pada tahun berjalan.
3. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha baik ditingkat produksi maupun distribusi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Tingginya persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Triwulan I Tahun 2021 menunjukkan bahwa mutu makanan yang beredar di wilayah kerja BBPOM di Palembang sudah baik. Hal ini karena adanya pengawasan yang dilakukan secara insentif dan berkelanjutan oleh BBPOM di Palembang serta adanya pengawalan oleh Pemda

d. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Pelaksanaan sampling dan pengujian sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian Triwulan I Tahun 2021
2. Peningkatan kemampuan uji Balai Besar POM di Palembang sesuai dengan persyaratan parameter uji kritis pada tahun berjalan.
3. Pemenuhan kebutuhan alat dan sarana penunjang pengujian (reagensia, baku pembanding, suku cadang, kebutuhan ruangan dan listrik, dll)
4. KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) kepada pelaku usaha yang dilakukan oleh petugas BBPOM di Palembang

5. Pengawasan yang dilakukan secara rutin di sarana produksi dan distribusi makanan yang dilakukan, termasuk pengawalan CAPA sarana oleh BBPOM di Palembang
- e. **Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya**
 4. Peningkatan kemampuan uji laboratorium pada Triwulan I Tahun 2021 dilakukan dengan peningkatan SRL pengujian sesuai dengan roadmap peningkatan SKL
 5. Peningkatan kompetensi SDM melalui kegiatan pelatihan / bimtek / seminar online terkait teknik pengujian
 6. Peningkatan awareness / kesadaran pelaku usaha melalui pelatihan, bimtek dan pemberian informasi serta Intensifikasi Pengawasan di bidang Obat dan Makanan.
 7. Peningkatan layan informasi dan pengaduan konsumen baik secara langsung, telp, WA, email dan pemanfaatan media sosial sehingga masyarakat menjadi lebih cerdas dan bijak dalam memilih Makanan yang aman dan bermutu.

3.1.2 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN II

2. MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP KEAMANAN DAN MUTU OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 1 Indikator Kinerja utama, yaitu :

Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang

Target, Realisasi dan Capaian Indikator ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi TW1 2021	Capaian (%)	Kriteria
Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	75,00	0	0	-

Tabel 12.
Capaian Indikator Kinerja Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index)
Terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu Triwulan I Tahun 2021

Realisasi Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu BBPOM di Palembang diperoleh berdasarkan hasil survei Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan (PRKOM). Pada Triwulan I Tahun 2021, belum diperoleh hasil survei. Apabila dibandingkan dengan target Triwulan I Tahun 2021 sebesar 0%, maka capaian BBPOM Palembang adalah 0%.

Capaian Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu Tahun 2020 sebesar 108,53%. Pada Triwulan I Tahun 2021 capaian Indeks Kesadaran Masyarakat belum dapat dihitung karena belum dilaksanakan survei oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan (PRKOM).

3.1.3 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN III

3. MENINGKATNYA KEPUASAN PELAKU USAHA DAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERIA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 3 Indikator Kinerja Utama, yaitu :

1. **Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan**

Target, Realisasi dan Capaian Indikator ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Indikator Kinerja	Target 2021	Target Tw 1 2021	Realisasi 2021	Capaian (%)	Kriteria
Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan	87	0	0	0	-

Tabel 13.
Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Triwulan I Tahun 2021

Realisasi Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Triwulan I Tahun 2021 adalah 0%. Target BBPOM Palembang untuk indikator ini adalah 87%, dengan demikian capaian BBPOM Palembang adalah 0%.

Capaian Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020 sebesar 101,94%. Pada Triwulan I Tahun 2021 capaian Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan belum dapat dihitung karena belum dilaksanakan survei oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan (PRKOM).

2. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

Indikator Kinerja	Target 2021	Target tw 1 2021	Realisasi Tw 1 2021	Capaian (%)	Kriteria
Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	74	0	0	0	-

Tabel 14

Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Triwulan I Tahun 2021

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Triwulan I Tahun 2021 adalah 0% dari target sebesar 74%. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian BBPOM Palembang adalah sebesar 0%.

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020 sebesar 104,56%. Pada Triwulan I Tahun 2021 capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan belum dapat dihitung karena belum dilaksanakan survei oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan (PRKOM).

3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

Target, Realisasi dan Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Target 2021	Target Tw 1 2021	Realisasi Tw 1 2021	Capaian (%)	Kriteria
----	-------------------	-------------	------------------	---------------------	-------------	----------

1.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik BPOM	90	0	0	0%	-
----	---	----	---	---	----	---

Tabel 15
Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM Triwulan I Tahun 2021

Realisasi Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM Triwulan I Tahun 2021 adalah 0% dari target sebesar 90%. Berdasarkan realisasi dibandingkan target maka capaian BBPOM Palembang adalah sebesar 0%.

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM Tahun 2020 sebesar 102,5%. Pada Triwulan I Tahun 2021 capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM belum dapat dihitung karena belum dilaksanakan survei oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan (PRKOM).

3.1.4 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN IV

4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik Di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Palembang

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 6 Indikator Kinerja utama, yaitu :

1. Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

Target, Realisasi dan Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Target TW 1 2021	Realisasi TW 1 2021	Capaian (%)	Kriteria
1.	Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	89	92,92	104,41%	Baik

Tabel 16.

Capaian Indikator Kinerja Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Triwulan I Tahun 2021

- a. Perbandingan Realisasi TW 1 2021 dan Target TW 1 2021

Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Palembang dengan target TW 1 sebesar 89 %, dengan realisasi sebesar 92,92% dan pencapaian sebesar 104,41% dengan kriteria Baik. Dari data tersebut, hampir semua hasil pemeriksaan sarana telah ditindaklanjuti, hal ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan di triwulan 2 Tahun 2021

b. Perbandingan Realisasi TW 1 2021 dan Target di Rencana Kerja 2021

Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Palembang dengan target tahun 2021 sebesar 89 %, dengan realisasi TW 1 sebesar 92,92% dan pencapaian sebesar 104,41% dengan kriteria Baik. Capaian ini harus dipertahankan dan bahkan ditingkatnya hingga akhir periode tahun 2021.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

1. Komitmen petugas dalam membuat surat keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.
2. Adanya monitoring dan evaluasi secara berjenjang untuk memastikan bahwa keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi telah dilaksanakan.
3. Tersedianya sarana dan prasarana serta alat pengolah data yang memadai seperti komputer, laptop, printer dalam menunjang kelancaran pekerjaan.

d. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Telah dilaksanakan peningkatan kompetensi petugas melalui kegiatan : Pelatihan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB), Cara Produksi Kosmetik yang Baik (CPKB), dan Cara Produksi Obat yang Baik (CPOB) dalam mendukung percepatan pembuatan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
2. Adanya tool SiLisaMesra yang dibuat untuk mengetahui hasil pemeriksaan yang terupdate dan dapat dijadikan tool untuk memonitor hasil pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti.

e. Evaluasi dan Analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

1. Adanya peningkatan kompetensi personil, mendorong peningkatan kinerja personil untuk segera menyelesaikan setiap tugas yang diberikan

2. Monitoring dan evaluasi telah dilakukan perbulan, sehingga apabila terdapat target indikator yang tidak tercapai dapat segera dilakukan rencana tindak lanjut untuk mencapainya.

2. Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder

Target, Realisasi dan Capaian untuk indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Target TW 1 2021	Realisasi TW 1 2021	Capaian (%)	Kriteria
1.	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti Oleh Stakeholder	60	17,72	29,53%	Sangat Kurang

Tabel 17

Capaian Indikator Kinerja Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder Triwulan I Tahun 2021

a. Perbandingan Realisasi TW 1 dan Target TW 1 Tahun 2021

Realisasi Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti Oleh Stakeholder di wilayah kerja BBPOM di Palembang pada Triwulan I Tahun 2021 adalah 17,72% bila dibandingkan dengan target 60,00%, maka capaian yang diperoleh sebesar 29,53% dan masuk dalam kriteria Sangat Kurang. Hasil pada TW 1 masih kurang. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi BBPOM di Palembang untuk terus melakukan upaya peningkatan keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti Oleh Stakeholder. Harapannya pada triwulan kedepannya realisasi dapat mencapai target yang telah ditetapkan

b. Perbandingan Realisasi TW 1 dan Target di Rencana Kerja 2021

Realisasi Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti Oleh Stakeholder di wilayah kerja BBPOM di Palembang pada Triwulan I Tahun 2021 adalah 17,72% bila dibandingkan dengan target Tahun 2021 sebesar 60,00%, maka capaian yang diperoleh sebesar 29,53% dan masuk dalam kriteria Sangat Kurang. Hal ini menunjukkan masih banyaknya surat tindak lanjut hasil pemeriksaan yang belum direspon oleh pelaku usaha dan lintas sektor terkait.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

1. Terlambatnya penyampaian rekomendasi/ surat tindak lanjut hasil pemeriksaan ke sarana/ pelaku usaha dan lintas sektor terkait
2. Kepatuhan dari pelaku usaha dalam melakukan perbaikan terhadap hasil pemeriksaan petugas Balai Besar POM di Palembang masih kurang, sehingga masih banyak yang belum ditindaklanjuti.

c. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Adanya Dana alokasi khusus (DAK) Triwulan I Tahun 2021 yang mensupport pemda untuk menindaklanjuti hasil pengawasan Balai Besar POM di Palembang.
2. Adanya sarana komunikasi melalui WA Group BBPOM di Palembang dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk mempercepat koordinasi dan komunikasi.
3. Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi yang dilakukan, selain untuk melihat kesesuaian penerapan peraturan yang berlaku, juga sekaligus melakukan pembinaan guna mengingatkan stakeholder untuk melakukan perbaikan / merespon surat tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disampaikan.
4. Pengawasan bersama dengan pemerintah daerah di sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, dimana setiap pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OMKA di luar ibukota Provinsi didampingi oleh petugas dari instansi pembina yang ada di Kabupaten / Kota terkait.

d. Evaluasi dan Analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

1. BBPOM di Palembang telah melaksanakan koordinasi dan kerja sama lintas sektor terkait dalam rangka penerapan Inpres No. 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan dengan terus berkoordinasi dengan instansi terkait dalam penerbitan Surat Keputusan Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan yang dikeluarkan oleh Bupati/ Walikota. Sampai saat ini telah ada 14 (empat belas) dari 17 (tujuh belas) kabupaten/ kota yang telah terbit Surat Keputusan Bupati / Walikota.
2. Telah dilakukannya monitoring dan evaluasi serta rencana tindak lanjut terhadap capaian indikator Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan secara berkala.

3. Telah dilakukan pelatihan/ bimbingan teknis kepada pelaku usaha/ penanggung jawab sarana dalam membuat tindakan perbaikan dan pencegahan, sehingga diharapkan mendorong peningkatan *feedback* tindak lanjut hasil pemeriksaan.

3. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

Target, Realisasi dan Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Target TW1 2021	Realisasi TW1 2021	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	88	100	113.64%	Sangat baik

Tabel 18.

Capaian Indikator Kinerja Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Triwulan I Tahun 2021

a. Perbandingan Target Triwulan I Tahun 2021 dengan Realisasi Triwulan I Tahun 2021

Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu pada Triwulan I Tahun 2021 adalah 100,00% bila dibandingkan dengan target 88,00%, maka capaian yang diperoleh sebesar 113.64% dan masuk dalam kriteria Sangat Baik. Tentunya hal ini menjadi poin penting sebagai salah satu bentuk mewujudkan layanan publik yang paripurna terutama terkait layanan perizinan (PSB, SKI, dan SKE).

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2021 terhadap Target Tahun 2019 dan 2020

Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu merupakan indikator yang baru ditetapkan pada Triwulan I Tahun 2021 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi dan capaian tahun - tahun sebelumnya.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

1. Kompetensi petugas terkait alur proses perizinan / registrasi serta komitmen petugas dalam melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha selama proses perizinan sampai terbit izin edar

2. Adanya monitoring dan evaluasi secara berjenjang untuk memastikan bahwa keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu telah dilaksanakan sesuai Service Level Agreement (SLA)
3. Tersedianya sarana dan prasarana serta alat pengolah data yang memadai seperti komputer, laptop, printer untuk dukungan percepatan penyelesaian pekerjaan
4. Dukungan bandwidth jaringan internet serta lancarnya aplikasi registrasi Obat dan Makanan serta SKI / SKE (e - BPOM)

d. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Peningkatan kompetensi petugas melalui kegiatan pelatihan / bimbingan teknis dalam rangka pendampingan dan percepatan pemberian rekomendasi Cara Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan yang Baik.
2. Pelaksanaan desk CAPA pada pelaku usaha untuk percepatan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan dalam rangka penerbitan rekomendasi.
3. Pelaksanaan desk Registrasi Pangan Olahan secara daring bersama Direktorat Registrasi Pangan Olahan untuk pendampingan pengurusan izin edar BPOM serta dalam upaya meningkatkan daya saing UMKM.

e. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya.

1. Peningkatan kompetensi petugas terkait alur atau prosedur dan persyaratan izin edar turut mendukung dalam percepatan evaluasi dokumen dan pencapaian target Keputusan Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu.
2. Pemenuhan dan peningkatan jumlah sarana dan prasarana pendukung dalam mencapai target Keputusan Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu antara lain alat laboratorium, laptop, printer, komputer dan penguatan jaringan / bandwidth.
3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pencapaian target Keputusan Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, antara lain melalui WA group dan email.

4. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Target, Realisasi dan Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Target TW 1 2021	Realisasi TW1 2021	Capaian (%)	Kriteria
-------------------	---------------------	-----------------------	-------------	----------

Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	55,00	62,16	113,02	Sangat Baik
--	-------	-------	--------	-------------

Tabel 19.

Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan I Tahun 2021

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2021

Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan pada Triwulan I Tahun 2021 adalah 62,16% bila dibandingkan dengan target triwulan 1 sebesar 55,00%, maka capaian yang diperoleh sebesar 113,04% dan masuk dalam kriteria Sangat Baik. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.

b. Perbandingan Target Tahun 2021 dan Realisasi Triwulan I Tahun 2021

Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan pada Triwulan I Tahun 2021 adalah 62,16% bila dibandingkan dengan target Tahun 2021 sebesar 55,00%, maka capaian yang diperoleh sebesar 113,04% dan masuk dalam kriteria Sangat Baik. Capaian ini akan terus dipertahankan dan ditingkatkan, sehingga pada akhir Tahun 2021 target tetap tercapai.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

1. Kepatuhan pelaku usaha dalam melakukan perbaikan dan pemenuhan persyaratan CPPOB meningkat.
2. Telah dilakukan penyamaan persepsi antar inspektur pangan dalam menetapkan kategori temuan, sehingga keputusan terhadap hasil pemeriksaan dapat seragam.

c. Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik Pangan yang telah diterima oleh Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota telah cukup memberikan manfaat kepada pelaku usaha dalam melakukan perbaikan guna pemenuhan CPPOB-IRTP.
2. Bimtek yang dilaksanakan oleh BPOM cukup optimal dalam meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terkait penerapan CPPOB.

3. Peningkatan kompetensi SDM Pemda Kabupaten/kota dalam menunjang efektifitas pengawasan, antara lain bimtek dan pelatihan Food Inspektur, Pelatihan DFI (District Food Inspector) serta pelatihan PKP (Penyuluh Keamanan Pangan).
4. Adanya WAG pimpinan dan penanggung jawab sarana MD, sehingga menjadi wadah konsultasi bagi pelaku usaha terkait CPPOB.

d. Evaluasi dan Analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

1. Telah dilakukan advokasi kepada kepala daerah dan koordinasi dengan instansi terkait untuk meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan.
2. Monitoring dan Evaluasi indikator perbulan sudah dilakukan sehingga apabila terdapat indikator yang tidak tercapai dapat segera dilakukan tindak lanjut.

5. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Target, Realisasi dan Capaian untuk indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2021	% Capaian	Kriteria
Persentase Sarana Distribusi Obat yang Memenuhi Ketentuan	63,00	65,69	104,26	Baik

Tabel 20.

Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan I Tahun 2021

a. Perbandingan Realisasi TW 1 2021 Dengan Target TW 1 2021

Realisasi Persentase Sarana Distribusi Obat yang Memenuhi Ketentuan untuk BBPOM di Palembang pada Triwulan I Tahun 2021 adalah 65,69% bila dibandingkan dengan target triwulan 1 sebesar 60,00%, maka capaian yang diperoleh sebesar 104,26% dan masuk dalam kriteria Baik. Capaian ini menunjukkan tingkat kepatuhan pelaku usaha distribusi Obat dan Makanan yang cukup baik terhadap peraturan yang berlaku. Pelaku usaha telah banyak melakukan perbaikan secara konsisten terkait temuan yang ada dalam upaya jaminan mutu, keamanan dan khasiat Obat dan Makanan yang beredar

b. Perbandingan Realisasi TW 1 2021 Dengan Target Tahun 2021

Realisasi Persentase Sarana Distribusi Obat yang Memenuhi Ketentuan untuk BBPOM di Palembang pada Triwulan I Tahun 2021 adalah 65,69% bila dibandingkan dengan target Tahun 2021 sebesar 60,00%, maka capaian yang diperoleh sebesar 104,26% dan masuk dalam kriteria Baik. Capaian ini akan terus ditingkatkan sehingga dapat masuk dalam kategori sangat baik.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

1. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam melakukan perbaikan terhadap hasil pemeriksaan sehingga temuan dapat menurun.
2. Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dan masyarakat sebagai dampak pengawasan dan KIE yang telah dilakukan secara intensif dan berkelanjutan, termasuk aplikasi Cek BPOM dan tagline Cek KLIK sehingga temuan produk TMK di sarana distribusi semakin menurun.
3. Peningkatan kompetensi petugas dalam pengawasan di sarana distribusi Obat dan Makanan
4. Peran aktif lintas sektor terkait dalam pengawasan Obat dan Makanan di sarana distribusi melalui DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan.

d. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Sosialisasi kepada pelaku usaha distribusi Obat dan Makanan seperti Cara Ritel Pangan yang Baik dan Cara Distribusi Obat yang Baik, sehingga meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam menjamin keamanan, mutu Obat dan Makanan di rantai distribusi.
2. KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) yang dilakukan oleh petugas BBPOM di Palembang kepada pelaku usaha sehingga meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
3. Pemeriksaan rutin terhadap sarana distribusi OMKA di wilayah Sumatera Selatan, dimana setiap pemeriksaan sarana distribusi OMKA di luar ibukota Provinsi didampingi oleh petugas dari instansi pembina yang ada di kabupaten/kota terkait
4. Adanya jaringan komunikasi, baik dengan lintas sektor ataupun penanggung jawab sarana sehingga dapat dijadikan media konsultasi dan KIE terkait Obat dan Makanan.

f. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya

1. Peningkatan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui pengawasan, bimbingan teknis dan sosialisasi.
2. Peningkatan kompetensi inspektur pengawas Obat dan Makanan, melalui bimbingan teknis, pelatihan, workshop, seminar dan sosialisasi.
3. Intensifikasi advokasi kepada kepala daerah dan koordinasi dengan instansi terkait untuk meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan.
4. Monitoring dan Evaluasi indikator perbulan sudah dilakukan dengan optimal.

6. Indeks Pelayanan Publik

Target, Realisasi dan Capaian untuk indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Target 2021	Target Tw 1 Tahun 2021	Realisasi Tw 1 2021	Capaian (%)	Kriteria
Indeks Pelayanan Publik	3,76	0	0	0%	-

Tabel 21.

Capaian Indikator Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Palembang Triwulan I Tahun 2021

Realisasi Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Palembang pada Triwulan I Tahun 2021 adalah 0 dari target sebesar 3,76 sehingga capaian yang diperoleh pada Triwulan I Tahun 2021 sebesar 0%.

Capaian Indeks Pelayanan Publik Tahun 2020 sebesar 108,26%. Pada Triwulan I Tahun 2021 capaian Indeks Pelayanan Publik belum dapat dihitung karena baru akan dihitung pada akhir tahun.

3.1.5 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN V

5. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI (KIE) OBAT DAN MAKANAN

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 4 Indikator Kinerja utama, yaitu :

1. **Tingkat KIE Obat dan Makanan yang Efektif di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang**

Target, Realisasi dan Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Target 2021	Target Tw 1 Tahun 2021	Realisasi Tw 1 2021	Capaian (%)	Kriteria
Tingkat KIE Obat dan Makanan yang Efektif di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	92,50	0	0	0%	-

Tabel 22.

Capaian Indikator Kinerja Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan yang Efektif di BBPOM Palembang Triwulan I Tahun 2021

a. Perbandingan Realisasi 2021 Terhadap Target 2021

Realisasi Tingkat KIE Obat dan Makanan yang Efektif di BBPOM Palembang pada Triwulan I Tahun 2021 adalah 0% bila dibandingkan dengan target 92,50%, maka capaian yang diperoleh sebesar 0%.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2021 terhadap Target tahun 2020

Capaian Tingkat KIE Obat dan Makanan yang Efektif di BBPOM Palembang Tahun 2020 sebesar 108,26%. Pada Triwulan I Tahun 2021 capaian Indeks Pelayanan Publik belum dapat dihitung karena sistem inputan hasil survei sedang dalam tahap pengembangan oleh Pusdatin.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

1. Adanya komitmen penuh dari puncak pimpinan BBPOM di Palembang dalam menciptakan KIE Obat dan Makanan yang Efektif di wilayah kerja BBPOM di Palembang.
2. Peran serta masyarakat dalam menunjang terlaksananya KIE Obat dan Makanan yang efektif.

d. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Pada Triwulan I Tahun 2021, Balai POM di Palembang melaksanakan 7 (tujuh) kali kegiatan KIE bersama tokoh masyarakat yang diselenggarakan dengan menggunakan protokol kesehatan Covid-19. Selain itu Layanan informasi dan pengaduan Triwulan I Tahun 2021 mencapai 181 layanan informasi. KIE melalui media sosial, yang ditayangkan di Instagram, Facebook, dan Twitter sedangkan berita aktual yg ditayangkan di subsite Balai POM. Selain itu diadakan juga KIE keliling menggunakan mobil keliling laboratorium dengan melakukan pengujian setempat bahan berbahaya di beberapa pasar (Korean Drama, Kejar Diskon).

- a. Keberhasilan pencapaian kinerja Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif disebabkan oleh :
 - Adanya program pengembangan kompetensi petugas dalam kegiatan KIE sehingga penyampaian informasi lebih variatif dan interaktif, serta mudah dipahami oleh masyarakat;
 - Adanya layanan informasi dan pengaduan konsumen melalui whatsapp, SMS, telepon maupun media sosial sehingga memperluas jaringan informasi ke masyarakat.
- b. Hambatan pelaksanaan program diantaranya :
 - Berkurangnya frekuensi kegiatan karena adanya pandemi Covid-19 yang melarang mengumpulkan massa dalam jumlah banyak (lebih dari 5 orang) sehingga kegiatan ditunda sampai waktu yang tidak dapat ditentukan;
 - Faktor cakupan pengawasan yang cukup luas sehingga belum semua daerah bisa terjangkau untuk diberikan KIE.
- c. Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:
 - KIE dilaksanakan secara online di media sosial baik berupa infografis, poster maupun dilakukan KIE live di media sosial;
 - Peningkatan komunikasi dengan media/pers sehingga KIE dapat dilakukan dalam bentuk pemberitaan di media cetak.
- e. **Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya.**

Pengukuran Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan baru dilakukan di Triwulan I Tahun 2021 sehingga belum dapat dilakukan evaluasi dan analisis.

2. Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Target, Realisasi dan Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Target 2021	Target Tw 1 Tahun 2021	Realisasi Tw 1 2021	Capaian (%)	Kriteria
Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40	0	3%	-	-

Tabel 23.

Capaian indikator Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Triwulan I Tahun 2021

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2021

Target Sekolah Pangan Aman BBPOM di Palembang Triwulan I Tahun 2021 adalah sebanyak 0 Sekolah. Realisasi Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang selama Triwulan I Tahun 2021 adalah 0 sehingga capaian yang diperoleh pada Triwulan I Tahun 2021 sebesar 0%. Sampai Triwulan 1 Tahun 2021 sudah terlaksana beberapa tahapan kegiatan seperti advokasi lintas sektor sehingga bisa memberikan kontribusi sekitar 3% dari persentase capaian kegiatan secara keseluruhan.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2021 terhadap Target tahun 2020

Capaian Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2020 sebesar 100,00%. Pada Triwulan I Tahun 2021 capaian Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman masih 0% dengan progres tahapan kegiatan sebesar 3%.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Beberapa faktor yang menjadi penyebab keberhasilan :

- Adanya dukungan dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan program PJAS

- Pelaksanaan program Nasional yang dilaksanakan di lokus daerah yang sama sehingga intervensi dapat berjalan secara menyeluruh dengan mengintervensi desa, sekolah dan pasar secara bersamaan di lokus daerah yang sama.

c. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Terlaksananya rangkaian kegiatan PJAS sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan.
2. Monev kegiatan PJAS telah dilaksanakan secara berkala termasuk menetapkan rencana tindak lanjut apabila ada target yang tidak tercapai.

d. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya

Pengukuran Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah Aman baru dilakukan di Triwulan I Tahun 2021 sehingga belum dapat dilakukan evaluasi dan analisis dibandingkan periode sebelumnya

3. Jumlah Desa Pangan Aman

Target, Realisasi dan Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Target 2021	Target Tw 1 Tahun 2021	Realisasi Tw 1 2021	Capaian (%)	Kriteria
Jumlah Desa Pangan Aman	12	0	17%	0%	-

Tabel 24
Capaian Indikator Kinerja Jumlah Desa Pangan Aman Triwulan I Tahun 2021

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2021

Target Desa Pangan Aman BBPOM di Palembang Triwulan I Tahun 2021 sebanyak 0 Desa sedangkan realisasi pada Triwulan I Tahun 2021 adalah 0 Desa. Berdasarkan angka realisasi tersebut capaian yang diperoleh adalah sebesar 17%.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2021 terhadap Target Tahun 2020

Capaian Desa Pangan Aman BBPOM di Palembang Tahun 2020 sebesar 100,00%. Pada Triwulan I Tahun 2021 capaian Desa Pangan Aman BBPOM di Palembang masih 0% dengan progres tahapan kegiatan sebesar 17%.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Beberapa faktor yang menjadi penyebab keberhasilan :

- Adanya dukungan dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD)
- Pelaksanaan program Nasional yang dilaksanakan di lokus daerah yang sama sehingga intervensi dapat berjalan secara menyeluruh dengan mengintervensi desa, sekolah dan pasar secara bersamaan di lokus daerah yang sama.

d. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Terlaksananya rangkaian kegiatan GKPD sesuai dengan Juknis yang telah ditetapkan.
2. Monev kegiatan GKPD telah dilaksanakan secara berkala termasuk menetapkan rencana tindak lanjut apabila ada target yang tidak tercapai.

e. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya.

Pengukuran Jumlah Desa Pangan Aman baru dilakukan di Triwulan I Tahun 2021 sehingga belum dapat dilakukan evaluasi dan analisis.

4. Jumlah Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya

Target, Realisasi dan Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Target 2021	Target Tw 1 Tahun 2021	Realisasi Tw 1 2021	Capaian (%)	Kriteria
Jumlah Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya	6	0	10%	-	-

Tabel 25.

Capaian Indikator Kinerja Jumlah Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya Triwulan I Tahun 2021

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2021

Target Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya BBPOM di Palembang Triwulan I Tahun 2021 adalah sebanyak 0 Pasar dan target tersebut terealisasi 17% sehingga capaian yang diperoleh pada Triwulan I Tahun 2021 sebesar 0%.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2021 terhadap Target tahun 2020

Capaian Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya BBPOM di Palembang Tahun 2020 sebesar 100,00%. Pada Triwulan I Tahun 2021 capaian Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya BBPOM di Palembang masih 0% dengan progres tahapan kegiatan sebesar 10%.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Beberapa faktor yang menjadi penyebab keberhasilan :

1. Adanya dukungan dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya
2. Pelaksanaan program Nasional yang dilaksanakan di lokus daerah yang sama sehingga intervensi dapat berjalan secara menyeluruh dengan mengintervensi desa, sekolah dan pasar secara bersamaan di lokus daerah yang sama.

d. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Terlaksananya rangkaian kegiatan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan.
2. Monev kegiatan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya telah dilaksanakan secara berkala termasuk menetapkan rencana tindak lanjut apabila ada target yang tidak tercapai.

e. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya

Pengukuran Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya baru dilakukan pada Triwulan I Tahun 2021 sehingga belum dapat dilakukan evaluasi dan analisis.

3.1.6 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN VI

6. MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PEMERIKSAAN PRODUK DAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 2 Indikator Kinerja utama, yaitu :

1. Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Target, Realisasi dan Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Target Tw I tahun 2021	Realisasi Tw I tahun 2021	Capaian (%)	Kriteria
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20	23,33	116, 65	Sangat Baik

Tabel 26.

Capaian Indikator Kinerja Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Triwulan I Tahun 2021

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2021

Realisasi Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang pada Triwulan I Tahun 2021 adalah 23,22% dari target sebesar 20%, sehingga capaian yang diperoleh pada Triwulan I Tahun 2021 sebesar 116,65% dengan kriteria Sangat Baik.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2021 Terhadap Target Tahun 2018 dan 2019

Realisasi Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang pada Triwulan I Tahun 2021 adalah 23,22% dari target tahun 2021 sebesar 85%, sehingga capaian yang diperoleh pada Triwulan I Tahun 2021 terhadap target tahun 2021 sebesar 27,45%.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

1. Kepatuhan terhadap Pedoman Sampling dan Pengujian Triwulan I Tahun 2021

Pemilihan parameter uji dalam proses pengujian pada Triwulan I Tahun 2021 dilakukan sesuai dengan Pedoman Sampling Triwulan I Tahun 2021

2. Peningkatan kemampuan uji Balai, termasuk di antaranya verifikasi Metode Analisa yang dilakukan pada Triwulan I Tahun 2021.
3. Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pengujian (alat laboratorium, reagensia dan media mikrobiologi, suku cadang, dll)
4. Kuantitas dan Kualitas SDM yang melakukan sampling dan pengujian Kualitas dan kuantitas SDM mulai dari yang melakukan sampling sesuai Pedoman Sampling sampai kepada kemampuan/kompetensi tenaga pengujian sangat berpengaruh pada pencapaian ini

d. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Koordinasi antara Bidang Pemeriksaan dengan Bidang Pengujian terkait perencanaan sampling yang semakin baik.
2. Peningkatan kepatuhan terhadap prioritas sampling serta sampling yang lebih variatif.
3. Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi yang secara rutin dilakukan, selain memeriksa kesesuaian dalam penerapan peraturan yang berlaku, juga memberikan pembinaan terkait pemenuhan persyaratan produk yang boleh beredar.

e. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya

1. Peningkatan kemampuan uji laboratorium dilakukan dengan beberapa cara, antara lain pemenuhan sarana pendukung pengujian.
2. Peningkatan kemampuan SDM selama Triwulan I Tahun 2021 dilaksanakan dengan seminar online melalui IDEAS mengenai dasar-dasar pengujian
3. Telah dilakukan tindak lanjut terhadap produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan, baik dengan cara dikembalikan ke produsen ataupun dimusnahkan, sehingga produk yang beredar merupakan produk yang aman dan bermutu.

2. Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Target, Realisasi dan Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Target Triwulan I tahun 2021	Realisasi Triwulan I tahun 2021	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	20	24,34	121,70	Tidak Dapat Disimpulkan

Tabel 27.

Capaian Indikator Kinerja Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Triwulan I Tahun 2021

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2021

Realisasi Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang pada Triwulan I Tahun 2021 adalah 24,34% dari target sebesar 20%, sehingga capaian yang diperoleh adalah 121,70% dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2021 terhadap Target tahun 2021

Realisasi Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang pada Triwulan I Tahun 2021 adalah 24,34% dari target tahun 2021 sebesar 77%, sehingga capaian yang diperoleh adalah 31,61%.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

1. Kepatuhan terhadap Pedoman sampling Triwulan I Tahun 2021. Parameter uji yang dilakukan pada Triwulan I Tahun 2021 sesuai dengan Pedoman Sampling Triwulan I Tahun 2021
2. Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pengujian
3. Kuantitas dan Kualitas SDM yang melakukan sampling dan pengujian Kualitas dan kuantitas SDM mulai dari yang melakukan sampling sesuai Pedoman Sampling sampai kepada kemampuan/kompetensi tenaga pengujian sangat berpengaruh pada pencapaian ini
4. Semakin meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan suatu produk dapat beredar di pasaran

d. Analisis Program / kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Koordinasi antara Bidang Pemeriksaan dengan Bidang Pengujian terkait perencanaan sampling yang semakin baik.
 2. Peningkatan kepatuhan terhadap prioritas sampling serta sampling yang lebih variatif.
 3. Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi yang secara rutin dilakukan, selain memeriksa kesesuaian dalam penerapan peraturan yang berlaku, juga memberikan pembinaan terkait pemenuhan persyaratan produk yang boleh beredar.
 4. Penindakan secara pro-justicia yang dilakukan kepada pelaku usaha yang nakal, mampu memberikan efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatan untuk menjual produk pangan yang berbahaya.
- e. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya.**
1. Peningkatan kemampuan uji laboratorium dilakukan dengan beberapa cara, antara lain pemenuhan sarana pendukung pengujian.
 2. Peningkatan kemampuan SDM selama Triwulan I Tahun 2021 dilaksanakan dengan seminar online melalui IDEAS mengenai dasar-dasar pengujian
 3. Telah dilakukan tindak lanjut terhadap produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan, baik dengan cara dikembalikan ke produsen ataupun dimusnahkan, sehingga produk yang beredar merupakan produk yang aman dan bermutu.

3.1.7

8. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENINDAKAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI PALEMBANG

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 1 Indikator Kinerja utama, yaitu Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan. Uraian Indikator Kinerja, target, realisasi, persentase capaian dan kriteria dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Indikator Kinerja	Target TW-I 2021	Realisasi TW-I 2021	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	20	31,46	157,32%	Tidak dapat disimpulkan

Tabel 28.
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan VII Triwulan I Tahun 2021

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2021

Realisasi Tingkat Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang selama Triwulan I Tahun 2021 adalah 31,46% dari target sebesar 20% sehingga capaian yang diperoleh pada Triwulan I Tahun 2021 sebesar 157,32% dengan kriteria Tidak dapat disimpulkan.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2021 terhadap Target tahun 2021



Grafik 3.1.7.1
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2021 terhadap Tahun 2021

Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan adalah 31,46%, bila dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 58%, maka capaian terhadap target akhir tahun adalah sebesar 54,24%.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Tercapainya target kinerja pada Triwulan I Tahun 2021 disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- Komitmen yang baik dari PPNS BBPOM di Palembang dalam menyelesaikan berkas perkara yang sedang ditangani dan menemukan target pelaku tindak pidana.

- b. Komunikasi dan Kerjasama yang baik dengan Korwas PPNS Polda Sumsel dan JPU Kejaksaan Tinggi Sumsel dalam penanganan berkas perkara.

Namun, dalam mencapai kinerja selama Triwulan I Tahun 2021, BBPOM di Palembang masih menemukan kendala sebagai berikut:

- a. Pelaku kejahatan baik masih berstatus saksi maupun tersangka ada yang tidak kooperatif bahkan melarikan diri sehingga penyelesaian berkas perkara terhambat.
- b. Pelaku kejahatan melakukan perlawanan saat dilakukan operasi penindakan sehingga tidak diperoleh barang bukti yang diperlukan, walaupun tim penyidik telah didampingi personil dari Polri, Pomdam dan Pol PP
- c. Pelaku kejahatan semakin pintar untuk menyembunyikan barang bukti
- d. Pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan di dunia maya sulit untuk ditelusuri baik lokasi maupun barang bukti
- e. Terbatasnya alat intelijen untuk mendeteksi dimana lokasi pelaku kejahatan.
- f. Masih ada berkas perkara P21 yang tidak bisa lanjut tahap2 karena tsb tidak memenuhi panggilan
- g. Keterbatasan kewenangan PPNS untuk melakukan penahanan di Undang-Undang Kesehatan sehingga proses pemberkasan terhambat (pelaku kejahatan dapat melarikan diri)
- h. Keterbatasan kemampuan investigasi untuk menemukan target penjahat dengan nilai ekonomi besar

d. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian target kinerja bidang Penindakan ditunjang program / kegiatan yang terlaksana dengan baik, yaitu:

- a. Perencanaan kegiatan intelijen atau investigasi dalam menindaklanjuti informasi dari Substansi Infokom, Substansi Pemeriksaan, maupun dari masyarakat dan pihak eksternal lainnya.
- b. Perencanaan kegiatan penindakan dalam menindaklanjuti hasil investigasi

- c. Koordinasi intensif dengan Korwas PPNS Polda Sumsel dan JPU di Kejaksaan Tinggi Sumsel
- d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang rutin dilaksanakan.
- e. **Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya.**
 1. Kerjasama lintas sektor penegakan hukum juga dilakukan secara intensif antara lain berupa konsultasi insidentil dalam penanganan berkas perkara dengan Korwas PPNS Polda Sumsel, JPU Kejati Sumsel, PN Palembang, Rupbasan Palembang
 2. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi serta rencana tindak lanjut secara rutin terhadap rencana dan kegiatan yang telah dilakukan.
 3. Dalam hal melakukan penahanan di Undang-Undang Pangan dapat meminta bantuan terhadap Korwas PPNS Polda Sumsel sehingga proses pemberkasan dapat berjalan lancar (pelaku kejahatan tidak dapat melarikan diri)

3.1.8 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN VIII

8. TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG YANG

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 2 Indikator Kinerja utama yaitu :

1. Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang

Target, Realisasi dan Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Target 2021	Target TW1 2021	Realisasi TW1 2021	Capaian (%)	Kriteria
Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	89	0	0	0	-

Tabel 29.

Capaian indikator Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang TW1 TA 2021

Realisasi Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang pada Triwulan I Tahun 2021 adalah 0 dari target 2021 sebesar 89 sehingga capaian yang diperoleh pada Triwulan I Tahun 2021 sebesar 0%.

Capaian Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2020 sebesar 96,14% (Target: 85 dan Realisasi: 81,72). Pada Triwulan I Tahun 2021 capaian Indeks RB belum dapat dihitung karena baru akan dihitung pada akhir tahun.

2. Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang

Pada akhir Triwulan I Tahun 2021 belum ada nilai AKIP Balai Besar POM di Palembang, yaitu hasil evaluasi Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap Lapkin BBPOM di Palembang TA 2020 dan penyelenggaraan SAKIP Triwulan I Tahun 2021.

Indikator Kinerja	Target 2021	Target TW1 2021	Realisasi TW1 2021	Capaian (%)	Kriteria
Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	85	0	0	-	-

Tabel 30.

Capaian indikator Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang TW1 TA 2021

Realisasi Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang pada Triwulan I Tahun 2021 adalah 0 dari target 2021 sebesar 85 sehingga capaian yang diperoleh pada Triwulan I Tahun 2021 sebesar 0%.

Capaian Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2020 sebesar 97,37% (Target: 81 dan Realisasi: 78,87). Pada Triwulan I Tahun 2021 capaian Indeks RB belum dapat dihitung karena baru akan dihitung pada akhir tahun.

3.1.9 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN IX

9. TERWUJUDNYA SDM BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG YANG BERKINERJA OPTIMAL

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 1 Indikator Kinerja utama, yaitu Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang. Adapun Target, Realisasi dan Capaian untuk indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Target 2021	Target TW1 2021	Realisasi TW1 2021	Capaian (%)	Kriteria
Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	82	0	0	0	-

Tabel 31.
Capaian indikator Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Triwulan I Tahun 2021

Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang pada Triwulan I Tahun 2021 adalah 0 dari target 2021 sebesar 82 sehingga capaian yang diperoleh pada Triwulan I Tahun 2021 sebesar 0%.

Capaian Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2020 sebesar 113,72% (Target: 75 dan Realisasi: 85,29). Pada Triwulan I Tahun 2021 capaian Indeks Profesionalitas ASN belum dapat dihitung karena baru akan dihitung pada akhir tahun.

3.1.10 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN X

10. MENGUATNYA LABORATORIUM, PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 2 Indikator Kinerja Utama.

1. Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP

Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP akan dilakukan penilaian oleh PPPOMN pada triwulan III tahun 2021.

2. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal

Target, Realisasi dan Capaian dari indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Target 2021	Target TW1 2021	Realisasi TW1 2021	Capaian (%)	Kriteria
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal	2,00	0	0	0	-

Tabel 32.

Capaian indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal TW 1 Tahun 2021

Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal akan dilakukan penilaian oleh PUSDATIN pada triwulan II tahun 2021.

1.1.11

CAPAIAN SASARAN KEGIATAN XI

11. TERKELOLANYA KEUANGAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG SECARA AKUNTABEL

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 2 Indikator Kinerja utama, yaitu :

1. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang

Indikator Kinerja	Target 2021	Target TW1 2021	Realisasi TW1 2021	Capaian (%)	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	94	30	0	0	-

Tabel 33.

Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Triwulan I Tahun 2021

Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Triwulan I Tahun 2021 belum dapat dihitung karena Nilai Kinerja Anggaran yang belum ada.

2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang

Indikator Kinerja	Target 2021	Target TW1 2021	Realisasi TW1 2021	Capaian (%)	Kriteria
-------------------	-------------	-----------------	--------------------	-------------	----------

Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (75%)	81,52%	Cukup
--	---------------	---------------	---------------	--------	-------

Tabel 34.
Capaian Indikator Kinerja Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Triwulan I Tahun 2021

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2021

Realisasi Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang selama Triwulan I Tahun 2021 adalah efisien (75%) dari target efisien (92%) sehingga capaian yang diperoleh pada TW1 2021 sebesar 81,52% dengan kriteria CUKUP.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan I Tahun 2021 terhadap Target Tahun 2021

Realisasi Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang selama Triwulan I Tahun 2021 adalah efisien (75%) dari target tahun 2021 efisien (92%) sehingga capaian yang diperoleh pada 2021 sebesar 81,52% dengan kriteria CUKUP.

c. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2021 terhadap Realisasi Tahun 2020

Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang adalah 75%, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 100% (efisien) maka capaian terhadap realisasi tahun 2020 sebesar 75,00%.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

1. Melakukan optimalisasi anggaran dengan kegiatan yang lebih dari yang ditetapkan sehingga dengan anggaran yang minimal menghasilkan kinerja yang maksimal.
2. Melakukan *back to back* kegiatan ditempat yang sama dengan hanya menambah waktu sehingga kegiatan yang dihasilkan lebih efektif dan efisien.

e. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Konsistensi pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal perencanaan

2. Komitmen antara pimpinan dan staf Balai Besar POM di Palembang untuk melaksanakan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan sebaik mungkin sesuai anggaran yang tercantum dalam DIPA Balai Besar POM di Palembang
3. Pembentukan tim monitoring dan evaluasi program dan kegiatan di lingkungan Balai Besar POM di Palembang Triwulan I Tahun 2021
4. Monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran dilakukan secara rutin.

f. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya.

Pada Triwulan I Tahun 2021 sudah dapat dilakukan evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut dan rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya yaitu berupa Monev Bulanan sebagai upaya untuk meningkatkan monitoring dan evaluasi serta rencana tindak lanjut terhadap capaian indikator kinerja BBPOM di Palembang dalam bentuk Laporan Kinerja Triwulan.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Untuk melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2021 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang memperoleh anggaran sebesar Rp.35.333.061.000,-.

Jenis Belanja	PAGU (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase Realisasi (%)
Belanja Pegawai	11.129.803.000	1.100.992.698	9,89%
Belanja Barang	13.833.457.000	715.740.006	5,17%
Belanja Modal	10.369.801.000	-	0,00%
Total Belanja	35.333.061.000	1,816.732.704	5,14%

Tabel 35.
Realisasi Anggaran TW 1 Tahun 2021 Berdasarkan Jenis Belanja 2021

Adapun realisasi dan capaian anggaran tiap indikator kegiatan Triwulan I Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Anggaran (APBNP)		
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	468.274.500	43.604.368	9,31%

	Syarat di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	252.052.000	5.883.380	2,33%
		Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	468.274.500	43.604.368	9,31%
		Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	252.052.000	5.883.380	2,33%
2	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu di Masing-Masing Wilayah Kerja UPT	124.000.000	69.408.600	55,97%
3	Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat Terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan	144.630.400	30.806.026	21,30%
		Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	183.168.800	34.796.400	19,00%
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik BPOM	50.645.000	14.604.360	28,84%
4	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan Serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	53.458.100	5.429.513	10,16%
		Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan	53.458.100	5.429.513	10,16%
		Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	264.840.000	24.004.038	9,06%
		Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	75.887.000	16.780.000	22,11%
		Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	427.664.800	43.436.106	10,16%
		Indeks Pelayanan Publik di Bidang Obat dan Makanan	66.210.000	6.001.010	9,06%
5	Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	1.350.000.000	247.160.502	18,31%
		Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	578.521.600	123.224.103	21,30%

		Jumlah Desa Pangan Aman	732.675.200	139.185.600	19,00%
		Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	202.580.000	58.417.440	28,84%
6	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	1.199.099.400	95.020.653	7,92%
		Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	799.399.600	63.347.102	7,92%
7	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	933.518.000	45.736.300	4,90%
8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan BBPOM di Palembang yang Optimal	Indeks RB UPT	2.757.738.300	519.983.986	18,86%
		Nilai AKIP UPT	3.676.984.400	693.311.981	18,86%
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Palembang yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	2.757.738.300	519.983.986	18,86%
10	Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP	8.267.730.000	145.341.900	1,76%
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal	3.676.984.400	693.311.981	18,86%
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Palembang Secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	3.676.984.400	693.311.981	18,86%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	1.838.492.200	346.655.991	18,86%

Tabel 36.
Realisasi Anggaran Tiap Indikator Kegiatan Triwulan I Tahun 2021

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja yang telah dilakukan secara mandiri, 11 (sebelas) Sasaran Kegiatan TW 1 tahun 2021 tidak semua capaiannya dapat dihitung pada TW 1 tahun 2021. Adapun hasil penilaian capaiannya sebagai berikut :

I. Sangat Baik

Sasaran Kegiatan 6 yaitu ” Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan diwilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang ”.

II. Baik

1. Sasaran Kegiatan 1 yaitu Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang.
2. Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang.

III. Cukup

Sasaran Kegiatan 11 yaitu Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang secara Akuntabel.

IV. Tidak Dapat Disimpulkan

Sasaran Kegiatan 7 yaitu Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang.

Pencapaian realisasi anggaran kegiatan sebesar 5,14% (Rp. 1.816.732.704) dari Rp. 29.255.452.000 Anggaran Tahun 2021 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang diwujudkan melalui 11 kegiatan dengan realisasi anggaran per kegiatan berkisar antara 5,83% sampai dengan 55,97%.

4.2 Saran

BBPOM di Palembang terus berkomitmen meningkatkan kinerja, tindak lanjut yang dilakukan, antara lain :

- a. Menambah sarana dan prasarana yang mendukung pengawasan obat dan makanan, seperti pengadaan alat-alat laboratorium, suku cadang, glassware, furniture pemenuhan infrastruktur, alat komunikasi, computer, peralatan khusus intelijen dan lain sebagainya.
- b. Meningkatkan kompetensi SDM dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan, layanan publik dan penindakan kejahatan obat dan makanan.
- c. Meningkatkan koordinasi dan advokasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder dalam rangka pengawasan pre dan post market termasuk tindak lanjut hasil pengawasan Balai Besar POM di Palembang serta penindakan terhadap kejahatan obat dan makanan.
- d. Melakukan review target berdasarkan capaian kinerja pada tw 1 tahun 2021.
- e. Melakukan update data sarana produksi dan distribusi sebagai data dukung pengawasan sarana berbasis risiko untuk memperluas cakupan pengawasan serta potensi kejahatan obat dan makanan.
- f. Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta rencana tindak lanjut terhadap capaian indikator kinerja BBPOM di Palembang dalam bentuk Laporan Kinerja Triwulan.
- g. Optimalisasi penggunaan aplikasi Monev Online yang ada untuk menunjang pencapaian Kinerja Balai Besar POM di Palembang.
- h. Berkomitmen mempertahankan penerapan akreditasi ISO/IEC 17025:2017 dan ISO 9001:2015;
- i. Mendorong kepatuhan pelaku usaha dengan memberikan bimbingan teknis dan pendampingan agar tetap berkomitmen dalam upaya memberikan jaminan keamanan dan mutu Obat dan Makanan.
- j. Meningkatkan inovasi layanan publik dalam rangka percepatan perizinan Obat dan Makanan.
- k. Meningkatkan internalisasi dan komitmen seluruh pegawai dalam penerapan Zona Integritas Menuju WBK WBBM di lingkungan BBPOM di Palembang.
- l. Meningkatkan sosialisasi website BPOM, HALO BPOM dan media sosial lainnya (IG, Twitter, Facebook);
- m. Melakukan pengujian terhadap parameter uji yg belum pernah dilakukan sebelumnya untuk meningkatkan Standar Ruang Lingkup Balai



***LAMPIRAN
LAPORAN
KINERJA
TRIWULAN I
TAHUN 2021***

**BALAI BESAR POM
DI PALEMBANG**



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI PALEMBANG**

NOMOR HK.02.02.9.96.05.20.1490a TAHUN 2020

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI PALEMBANG
TAHUN 2020-2024**

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

- Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
 8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1275);

9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
10. Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan HK.02.01.1.2.06.20.221 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG TAHUN 2020-2024.

Kesatu : Mengesahkan dan memberlakukan Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2020 –2024 yang selanjutnya disebut Renstra Balai/Balai Besar POM di Palembang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Renstra Balai/Balai Besar POM di Palembang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai/Balai Besar POM di Palembang untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Ketiga : Renstra Balai/Balai Besar POM di Palembang sebagaimana

dimaksud pada diktum Kedua berfungsi sebagai:

- a. acuan bagi Balai/Balai Besar POM di Palembang dan Loka POM di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
- b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Balai/Balai Besar POM di Palembang

Keempat : Terhadap pelaksanaan Renstra Balai/Balai Besar POM di Palembang dilakukan:

- a. Pemantauan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- b. Evaluasi pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan Renstra.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 20 MEI 2020

.....

Pt. Kepala Balai Besar Pengawas
Obat dan Makanan di Palembang



Dra. Arofah Nurfahmi, Apt., MM

RENSTRA BBPOM DI PALEMBANG 2020-2024

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,80	83,60	86,60	90,00	92,30
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78,00	80,00	82,00	84,00	86,00
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95,00	95,00	96,00	96,00	97,00
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	75,00	76,00	77,00	78,00	80,00
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	72,00	75,00	78,00	81,00	83,00
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00
	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	71,00	74,00	77,00	80,00	83,00
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Palembang	89,50	90,00	90,50	91,00	92,00

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
POM di Palembang						
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87,00	89,00	91,00	93,00	95,00
	2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00
	3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85,00	88,00	91,00	94,00	97,00
	4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00
	5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00	63,00	66,00	68,00	71,00
	6. Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Palembang	3,51	3,76	4,01	4,26	4,51
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	71,00	74,00	77,00	81,00	84,00
	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20	40	62	82	104
	Jumlah desa pangan aman	6	12	19	25	32
	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	3	6	9	13	17
Meningkatnya efektifitas pemeriksaan	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82,00	85,00	88,00	91,00	94,00
	Persentase sampel makanan yang diperiksa	75,00	77,00	80,00	83,00	85,00

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	dan diuji sesuai standar					
Meningkatnya efektifitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	52,00	58,00	64,00	69,00	75,00
Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan BBPOM di Palembang yang optimal	Indeks RB BBPOM di Palembang	85,00	89,00	93,00	94,00	95,00
	Nilai AKIP BBPOM di Palembang	81,00	85,00	90,00	91,00	92,00
Terwujudnya SDM BBPOM di Palembang yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN BBPOM di Palembang	75,00	82,00	85,00	88,00	91,00
Menguatnya laboratorium,	Persentase pemenuhan terhadap standar GLP oleh Lab pengujian BBPOM di	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Palembang					
	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Palembang yang optimal	1,51	2,00	2,26	2,50	3,00
Terkelolanya Keuangan BBPOM di Palembang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Palembang	93,00	94,00	95,00	96,00	97,00
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran di BBPOM di Palembang	Efisien (90%)	Efisien (92%)	Efisien (94%)	Efisien (96%)	Efisien (99%)

USULAN SASARAN KEGIATAN, IKU DAN TARGET TAHUN 2020 - 2024
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI Palembang

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Program Pengawasan Obat dan Makanan													
Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia								Rp 35.841.732.000	Rp 39.425.905.200	Rp 43.368.495.720	Rp 47.705.345.292	Rp 52.475.879.821	
	Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	Provinsi Sumatera Selatan						Rp 953.000.000	Rp 1.048.300.000	Rp 1.153.130.000	Rp 1.268.443.000	Rp 1.395.287.300	1. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang 2. Loka POM di LubukLinggau
	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat		80,8	83,6	86,6	90	92,3						
	2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat		78	80	82	84	86						
	3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pengawasan		95	95	96	96	97						
	4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		75	76	77	78	80						
	Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	Provinsi Sumatera Selatan						Rp 102.000.000	Rp 112.200.000	Rp 123.420.000	Rp 135.762.000	Rp 149.338.200	1. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang
	1. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu		72	75	78	81	83						
	Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	Provinsi Sumatera Selatan						Rp 1.249.411.000	Rp 1.374.352.100	Rp 1.511.787.310	Rp 1.662.966.041	Rp 1.829.262.645	1. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang
	1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan		86	87	88	89	90						
	2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan		71	74	77	80	83						
	3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Palembang		89,5	90	90,5	91	92						
	Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	Provinsi Sumatera Selatan						Rp 596.552.000	Rp 656.207.200	Rp 721.827.920	Rp 794.010.712	Rp 873.411.783	1. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang 2. Loka POM di Lubuklinggau
	1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan		87	89	91	93	95						
	2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan		55	60	65	70	75						
	3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu		85	88	91	94	97						
	4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan		50	55	60	65	70						
	5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan		60	63	66	68	71						
	6. Indeks Pelayanan Publik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang		3,51	3,76	4,01	4,26	4,51						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	Provinsi Sumatera Selatan						Rp 2.001.376.000	Rp 2.201.513.600	Rp 2.421.664.960	Rp 2.663.831.456	Rp 2.930.214.602	1. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang 2. Loka POM di Lubuklinggau
	1. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan		71	74	77	81	84						
	2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman		20	40	62	82	104						
	3. Jumlah desa pangan aman		6	12	19	25	32						
	4. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya		3	6	9	13	17						
	Sasaran Kegiatan 6: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	Provinsi Sumatera Selatan						Rp 10.269.321.000	Rp 11.296.253.100	Rp 12.425.878.410	Rp 13.668.466.251	Rp 15.035.312.876	1. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang
	1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar		82	85	88	91	94						
	2. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar		75	77	80	83	85						
	Sasaran Kegiatan 7: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	Provinsi Sumatera Selatan						Rp 982.145.000	Rp 1.080.359.500	Rp 1.188.395.450	Rp 1.307.234.995	Rp 1.437.958.495	1. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang 2. Loka POM di Lubuklinggau
	1. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan		52	58	64	69	75						
	Sasaran Kegiatan 8: Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang optimal	Provinsi Sumatera Selatan						Rp 418.308.000	Rp 460.138.800	Rp 506.152.680	Rp 556.767.948	Rp 612.444.743	1. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang 2. Loka POM di Lubuklinggau
	1. Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang		85	89	93	94	95						
	2. Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang		81	85	90	91	92						
	Sasaran Kegiatan 9: Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang berkinerja optimal	Provinsi Sumatera Selatan						Rp 13.272.106.000	Rp 14.599.316.600	Rp 16.059.248.260	Rp 17.665.173.086	Rp 19.431.690.395	1. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang 2. Loka POM di Payakumbuh 3. Loka POM di Dharmasraya
	1. Indeks Profesionalitas ASN di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang		75	82	85	88	91						
	Sasaran Kegiatan 10: Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Provinsi Sumatera Selatan						Rp 5.074.650.000	Rp 5.582.115.000	Rp 6.140.326.500	Rp 6.754.359.150	Rp 7.429.795.065	1. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang 2. Loka POM di Lubuklinggau
	1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP		70	75	80	85	90						
	2. Indeks pengelolaan data dan informasi di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang optimal		1,51	2	2,26	2,5	3						
	Sasaran Kegiatan 11: Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang secara Akuntabel	Provinsi Sumatera Selatan						Rp 922.863.000	Rp 1.015.149.300	Rp 1.116.664.230	Rp 1.228.330.653	Rp 1.351.163.718	1. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang 2. Loka POM di LubukLinggau
	1. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang		93	94	95	96	97						
	2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang		Efisien (90%)	Efisien (92%)	Efisien (94%)	Efisien (96%)	Efisien (99%)						

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

NOMOR HK.02.02.9.96.07.20.2069 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KINERJA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

TAHUN 2021

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang pada tahun 2021 serta tindak lanjut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 dan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Nomor HK.02.02.9.96.05.20.1490a tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2021;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG TAHUN 2021.

-
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2021 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2021.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 21 Juli 2020

PLT.KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG




AROFAH NURFAHMI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

NOMOR HK.02.02.9.96.07.20.2069 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI PALEMBANG TAHUN 2021

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
PALEMBANG TAHUN 2021

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,60
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80,00
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95,00
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76,00
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	75,00
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	87,00
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	74,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Palembang	90,00

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89,00
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60,00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88,00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Palembang	3,76
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,50
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40
		Jumlah desa pangan aman	12
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	6
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85,00
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	77,00



BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

Jl. Pangeran Ratu Seberang Ulu I Jakabaring Palembang Sumatera Selatan

Telp. (0711) 510126, 510042, 510804 ; Fax. (0711) 510195

email : bpomplg@gmail.com ; bpomplg@yahoo.com ; bpom_palembang@pom.go.id

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	58,00
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Palembang yang optimal	Indeks RB BBPOM di Palembang	89,00
		Nilai AKIP BBPOM di Palembang	85,00
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Palembang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Palembang	82,00
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	75,00
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Palembang yang optimal	2,00
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Palembang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Palembang	94,00
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Palembang	Efisien (92%)

PLT.KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG



AROFAH NURFAHMI

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

NOMOR HK.02.02.9.96.07.20.2069 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KINERJA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

TAHUN 2021

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang pada tahun 2021 serta tindak lanjut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 dan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Nomor HK.02.02.9.96.05.20.1490a tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2021;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang
Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 986);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan
Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019
Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BALAI
BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI

PALEMBANG TAHUN 2021.

- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2021 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2021.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 21 Juli 2020

PLT KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI PALEMBANG



AROFAH NURFAHMI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

NOMOR HK.02.02.9.96.07.20.2069 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI PALEMBANG TAHUN 2021

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
PALEMBANG TAHUN 2021

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,60
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80,00
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95,00
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76,00
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	75,00
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	87,00
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	74,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat	90,00

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
		terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Palembang	
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89,00
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60,00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88,00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Palembang	3,76
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,50
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40
		Jumlah desa pangan aman	12
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	6
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85,00
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	77,00



BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

Jl. Pangeran Ratu Seberang Ulu I Jakabaring Palembang Sumatera Selatan
Telp. (0711) 510126, 510042, 510804 ; Fax. (0711) 510195
email : bpomplg@gmail.com ; bpomplg@yahoo.com ; bpom_palembang@pom.go.id

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	58,00
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Palembang yang optimal	Indeks RB BBPOM di Palembang	89,00
		Nilai AKIP BBPOM di Palembang	85,00
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Palembang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Palembang	82,00
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	75,00
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Palembang yang optimal	2,00
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Palembang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Palembang	94,00
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Palembang	Efisien (92%)

PLT.KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG



AROFAH NURFAHMI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yosef Dwi Irwan, S.Si., Apt
Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Palembang
Selanjutnya disebut pihak pertama.

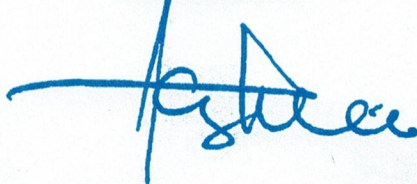
Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP.
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2020

Pihak Kedua



(Dr. Penny K. Lukito, MCP)

Pihak Pertama



(Yosef Dwi Irwan, S.Si., Apt)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BALAI BESAR POM DI PALEMBANG**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,60
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80,00
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95,00
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76,00
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	75,00
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	87,00
		Indeks kepuasan masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	74,00
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Palembang	90,00

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89,00
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60,00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88,00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Palembang	3,76
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,50
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40
		Jumlah desa pangan aman	12
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	6
6	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85,00
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	77,00



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

Jl. Pangeran Ratu Seberang Ulu I Jakabaring Palembang Sumatera Selatan

Telp. (0711) 510126, 510042, 510804 ; Fax. (0711) 510195

email : bpomplg@gmail.com ; bpomplg@yahoo.com ; bpom_palembang@pom.go.id

BADAN POM

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
7	Meningkatnya efektifitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan	58,00
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Palembang yang optimal	Indeks RB BBPOM di Palembang	89,00
		Nilai AKIP BBPOM di Palembang	85,00
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Palembang yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN BBPOM di Palembang	82,00
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	75,00
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Palembang yang optimal	2,00
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Palembang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Palembang	94,00
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Palembang	Efisien (92%)

Kegiatan

Anggaran

- Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia Rp. 20.096.949.000,00
- Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM Rp. 15.236.112.000,00

Jakarta, Desember 2020

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang

Yosef Dwi Irwan, S.Si., Apt

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN	
			B3	B6	B9	B12*	(Rupiah)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Palembang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,60%	83,60%	83,60%	83,60%	Rp	468.274.500
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	Rp	252.052.000
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	Rp	468.274.500
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76,00%	76,00%	76,00%	76,00%	Rp	252.052.000
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	0	0	0	75,00	Rp	124.000.000
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	0	0	0	87,00	Rp	144.630.400
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	0	0	0	74,00	Rp	183.168.800
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Palembang	0	0	0	90,00	Rp	50.645.000
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Palembang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89,00%	89,00%	89,00%	89,00%	Rp	53.458.100
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	Rp	53.458.100
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88,00%	88,00%	88,00%	88,00%	Rp	264.840.000

		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%	Rp 75.887.000
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00%	63,00%	63,00%	63,00%	Rp 427.664.800
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Palembang	0	0	0	3,76	Rp 66.210.000
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	-	92,50	92,50	92,50	Rp 1.350.000.000
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah	0	20,00%	75,00%	40	Rp 578.521.600
		Jumlah desa pangan aman	0	25,00%	75,00%	12	Rp 732.675.200
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	0	15,00%	75,00%	6	Rp 202.580.000
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20,00%	40,00%	60,00%	85,00%	Rp 1.199.099.400
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20,00%	40,00%	60,00%	77,00%	Rp 799.399.600
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	20,00%	35,00%	45,00%	58,00%	Rp 933.518.000
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Palembang yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Palembang	0	0	0	89,00	Rp 2.757.738.300
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Palembang	0	0	0	85,00	Rp 3.676.984.400
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Palembang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Palembang	0	0	0	82,00	Rp 2.757.738.300
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	0,00%	0,00%	0,00%	75,00%	Rp 8.267.730.000
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Palembang yang optimal	-	2,00	2,00	2,00	Rp 3.676.984.400

11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Palembang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Palembang	30,00	60,00	80,00	94,00	Rp 3.676.984.400
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Palembang	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Rp 1.838.492.200



Palembang,
Kepala Balai Besar Pengawas Obat
dan Makanan di Palembang

(Signature)
Yosef Dwi Irwan, S.Si., Apt

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN	
			B3	B6	B9	B12*	(Rupiah)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Palembang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,60%	83,60%	83,60%	83,60%	Rp	468.274.500
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	Rp	252.052.000
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	Rp	468.274.500
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76,00%	76,00%	76,00%	76,00%	Rp	252.052.000
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	0	0	0	75,00	Rp	124.000.000
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	0	0	0	87,00	Rp	144.630.400
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	0	0	0	74,00	Rp	183.168.800
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Palembang	0	0	0	90,00	Rp	50.645.000
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Palembang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89,00%	89,00%	89,00%	89,00%	Rp	53.458.100
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	Rp	53.458.100
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88,00%	88,00%	88,00%	88,00%	Rp	264.840.000

		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%	Rp 75.887.000
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00%	63,00%	63,00%	63,00%	Rp 427.664.800
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Palembang	0	0	0	3,76	Rp 66.210.000
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	-	92,50	92,50	92,50	Rp 1.350.000.000
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah	0	20,00%	75,00%	40	Rp 578.521.600
		Jumlah desa pangan aman	0	25,00%	75,00%	12	Rp 732.675.200
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	0	15,00%	75,00%	6	Rp 202.580.000
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20,00%	40,00%	60,00%	85,00%	Rp 1.199.099.400
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20,00%	40,00%	60,00%	77,00%	Rp 799.399.600
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	20,00%	35,00%	45,00%	58,00%	Rp 933.518.000
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Palembang yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Palembang	0	0	0	89,00	Rp 2.757.738.300
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Palembang	0	0	0	85,00	Rp 3.676.984.400
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Palembang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Palembang	0	0	0	82,00	Rp 2.757.738.300
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	0,00%	0,00%	0,00%	75,00%	Rp 8.267.730.000
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Palembang yang optimal	-	2,00	2,00	2,00	Rp 3.676.984.400

11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Palembang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Palembang	30,00	60,00	80,00	94,00	Rp 3.676.984.400
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Palembang	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Rp 1.838.492.200



Palembang,
Kepala Balai Besar Pengawas Obat
dan Makanan di Palembang

Yosef Dwi Irwan, S.Si., Apt.

**MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
BALAI BESAR POM PALEMBANG
TRIWULAN I TAHUN 2021**

	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2021	Target triwulanan (kumulatif)				Realisasi per Triwulan (Kumulatif)			Capaian terhadap target TW (kumulatif)	Capaian terhadap target tahun (kumulatif)
					s.d TW I	s.d TW II	s.d TW III	s.d TW IV	s.d TW I			s.d TW I	s.d TW I
									Pembilang	Penyebut	Realisasi		
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Palembang	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83.60%	83,60%	83.60%	83.60%	83,60%	244	253	96,44%	115,36%	115,36%
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Palembang	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	33	35	94,29%	117,86%	117,86%
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Palembang	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	37	37	100.00%	105,26%	105,26%
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Palembang	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76.00%	76.00%	76.00%	76.00%	76.00%	64	105	60,95	80,20%	80,20%
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	5	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	75	0	0	0	75	-	-	-	0	0
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	87	0	0	0	87	-	-	-	0	0

3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	7	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	74	0	0	0	74	-	-	-	0	0
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Palembang	90	0	0	0	90	-	-	-	0	0
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Palembang	9	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89.00%	89.00%	89.00%	89.00%	89.00%	113	128	92,92	104,41%	104,41%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Palembang	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60.00%	60.00%	60.00%	60.00%	60.00%	28	85	17,72	29,53%	29,53%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Palembang	11	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88.00%	88.00%	88.00%	88.00%	88.00%	48	48	100.00%	113,64%	113,64%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Palembang	12	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55.00%	55.00%	55.00%	55.00%	55.00%	23	37	62.16%	113,02%	113,02%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Palembang	13	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63.00%	63.00%	63.00%	63.00%	63.00%	134	204	65.69%	104,26%	104,26%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Palembang	14	Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Palembang	3,76	0	0	0	3,76	-	-	-	0	0

5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	15	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,50	0	92,50	92,50	92,50	-	-	-	0	0
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	16	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40	0	20%	75%	40			3.00%	-	3,00%
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	17	Jumlah desa pangan aman	12	0	25%	75%	12			17.00%	-	17,00%
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	18	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	6	0	15%	75%	6			10.00%	-	10,00%
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	19	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85,00%	20,00%	40,00%	60,00%	85,00%	-	-	23.33%	116,65%	27,45%
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	20	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	77,00%	20,00%	40,00%	60,00%	77,00%	-	-	24.34%	121,70%	31,61%
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	21	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	58,00%	20,00%	35,00%	45,00%	58,00%	-	-	31.46%	157,32%	54,25%
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Palembang yang optimal	22	Indeks RB Balai Besar POM di Palembang	89	0	0	0	89	-	-	-	0	0
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Palembang yang optimal	23	Nilai AKIP Balai Besar POM di Palembang	85	0	0	0	85	-	-	-	0	0

9	Terwujudnya SDM BBPOM di Palembang yang berkinerja optimal	24	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Palembang	82	0	0	0	82	-	-	-	0	0
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	25	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	75,00%	0%	0%	0%	75,00%	-	-	-	0	0
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	26	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Palembang yang optimal	2	0	2	2	2	-	-	-	0	0
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Palembang secara Akuntabel	27	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Palembang	94	30	60	80	94	-	-	-	0	0
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Palembang secara Akuntabel	28	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Palembang	92,00%	92,00%	92,00%	92,00%	92,00%	-	-	75%	81,52%	81,52%

Palembang, 10 April 2021

Kepala Balai Besar POM di Palembang



Yosef Dwi Irvan, S.Si., Apt

VI. CAPAIAN TINGKAT EFISIENSI S.D TRIWULAN I TAHUN 2021

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,60	96,44	115,36	468.274.500	43.604.368	9,31	12,39	11,39	75 %
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80,00	94,29	117,86	252.052.000	5.883.380	2,33	50,49	49,49	75 %
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95,00	100,00	105,26	468.274.500	43.604.368	9,31	11,30	10,30	75 %
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76,00	60,95	80,20	252.052.000	5.883.380	2,33	34,36	33,36	75 %
5	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	75,00	0,00	0,00	124.000.000	69.408.600	55,97	0,00	-1,00	75 %
6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	87,00	0,00	0,00	144.630.400	30.806.026	21,30	0,00	-1,00	75 %
7	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	74,00	0,00	0,00	183.168.800	34.796.400	19,00	0,00	-1,00	75 %
8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Palembang	90,00	0,00	0,00	50.645.000	14.604.360	28,84	0,00	-1,00	75 %
9	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89,00	83,33	93,63	53.458.100	5.429.513	10,16	9,22	8,22	75 %
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60,00	25,00	41,67	53.458.100	5.429.513	10,16	4,10	3,10	75 %
11	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88,00	100,00	113,64	264.840.000	24.004.038	9,06	12,54	11,54	75 %
12	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00	62,16	113,02	75.887.000	16.780.000	22,11	5,11	4,11	75 %
13	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00	65,69	104,27	427.664.800	43.436.106	10,16	10,27	9,27	75 %
14	Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Palembang	3,76	0,00	0,00	66.210.000	6.001.010	9,06	0,00	-1,00	75 %
15	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,50	0,00	0,00	1.350.000.000	247.160.502	18,31	0,00	-1,00	75 %
16	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40,00	0,00	0,00	578.521.600	123.224.103	21,30	0,00	-1,00	75 %
17	Jumlah desa pangan aman	12,00	0,00	0,00	732.675.200	139.185.600	19,00	0,00	-1,00	75 %
18	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	6,00	0,00	0,00	202.580.000	58.417.440	28,84	0,00	-1,00	75 %
19	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85,00	23,33	27,45	1.199.099.400	95.020.653	7,92	3,46	2,46	75 %
20	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	77,00	23,84	30,96	799.399.600	63.347.102	7,92	3,91	2,91	75 %
21	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	58,00	31,46	54,24	933.518.000	45.736.300	4,90	11,07	10,07	75 %
22	Indeks RB Balai Besar POM di Palembang	89	0,00	0,00	2.757.738.300	519.983.986	18,86	0,00	-1,00	75 %
23	Nilai AKIP Balai Besar POM di Palembang	85	0,00	0,00	3.676.984.400	693.311.981	18,86	0,00	-1,00	75 %
24	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Palembang	82	0,00	0,00	2.757.738.300	519.983.986	18,86	0,00	-1,00	75 %
25	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	75	0,00	0,00	8.267.730.000	145.341.900	1,76	0,00	-1,00	75 %
26	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Palembang yang optimal	2,00	0,00	0,00	3.676.984.400	693.311.981	18,86	0,00	-1,00	75 %
27	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Palembang	94,00	0,00	0,00	3.676.984.400	693.311.981	18,86	0,00	-1,00	75 %
28	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Palembang	92,00	75,00	81,52	1.838.492.200	346.655.991	18,86	4,32	3,32	75 %
TOTAL				38,54	35.333.061.000	4.733.664.568	13,40	2,88	1,88	75 %

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

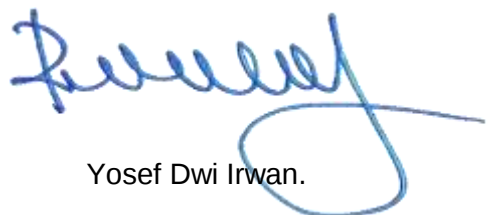
NOTA DINAS
NOMOR: PR.08.01.961.04.21.003

Yth : Koordinator Kelompok Substansi Pemeriksaan
Sub Koordinator sub kelompok substansi Inspeksi
Dari : Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang
Lampiran : -
Hal : Apresiasi
Tanggal : 09 April 2021

Menindaklanjuti realisasi / capaian target Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tri Wulan I (Periode Januari s/d Maret 2021), di mana ada indikator Ada Indikator Kinerja yang realisasi sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu :

No.	Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Keterangan
1.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89%	92,92%	Target Tercapai 104,41%
2.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88%	100 %	Target Tercapai 113,64%
3.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55%	62,16%	Target Tercapai 113,02%
4.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63%	65,69%	Target Tercapai 104,26%
5.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20%	23,33%	Target Tercapai 116,65%

Saya memberikan **Apresiasi** kepada Saudara, dan selanjutnya agar tetap konsisten dalam meningkatkan kinerja sehingga realisasi tetap sesuai rencana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Demikian disampaikan terima kasih atas kinerja yang telah dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.


Yosef Dwi Irwan.

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

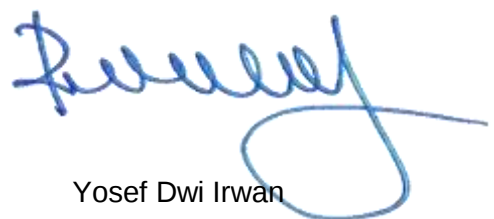
NOTA DINAS
NOMOR: PR.08.01.961.04.21.004

Yth : Koordinator Kelompok Substansi Pengujian
Sub Koordinator sub kelompok substansi Pengujian Kimia
Sub Koordinator sub kelompok substansi Pengujian Mikrobiologi
Dari : Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang
Lampiran : -
Hal : Apresiasi
Tanggal : 09 April 2021

Menindaklanjuti realisasi / capaian target Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tri Wulan I (Periode Januari s/d Maret 2021), di mana ada indikator Ada Indikator Kinerja yang realisasi sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu :

No.	Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Keterangan
1.	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	83,60%	96,44 %	Target Tercapai 115,36%
2.	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	80%	94,29%	Target Tercapai 117,86%
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95%	100%	Target Tercapai 105,26%
4.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20%	23,33%	Target Tercapai 116,65%

Saya memberikan **Apresiasi** kepada Saudara, dan selanjutnya agar tetap konsisten dalam meningkatkan kinerja sehingga realisasi tetap sesuai rencana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Demikian disampaikan terima kasih atas kinerja yang telah dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.


Yosef Dwi Irwan

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

NOTA DINAS
NOMOR: PR.08.01.961.04.21.002

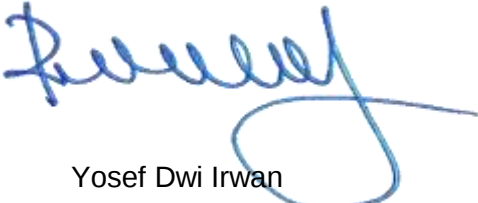
Yth : Koordinator Kelompok Substansi Pemeriksaan
Sub Koordinator sub kelompok substansi Inspeksi
Dari : Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang
Lampiran : -
Hal : Teguran
Tanggal : 09 April 2021

Menindaklanjuti realisasi / capaian target Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tri Wulan I (Periode Januari s/d Maret 2021), di mana ada indikator Ada Indikator Kinerja yang realisasi tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu :

No.	Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Keterangan
1.	Persentase Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60 %	17,72 %	Target Tidak Tercapai (Capaian: 29,53% (<50 kriteria sangat kurang).

Sehubungan dengan hal tersebut, Saya memberikan **Teguran** kepada Saudara, dan selanjutnya agar melakukan pemetaan akar masalah dan upaya perbaikan dalam bentuk CAPA untuk mengejar ketertinggalan target sehingga realisasi sesuai rencana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih


Yosef Dwi Irwan